KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BerAKHLAK

bangga melayani bangsa

LAPOR!

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2025

DISUSUN OLEH :

Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP ini disusun berdasarkan sasaran strategis pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan Tahun 2025-2029.

LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas untuk menyampaikan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk guna mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. LKjIP ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih *(good governance and clean government)* serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Semoga laporan LKjIP ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan bahan evaluasi bagi peningkatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Nganjuk.

Nganjuk, MARET 2026
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Nganjuk

dr. Tien Farida Yani, MMRS
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP. 19730308 200501 2 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. GAMBARAN UMUM 1
B. LANDASAN HUKUM 2
C. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 3
D. ISU-ISU STRATEGIS 25
E. SISTEMATIKA LAPORAN 27
BAB II PERENCANAAN KINERJA 29
A. IKHTISAR /RINGKASAN RENSTRA 29
B. PERJANJIAN KINERJA 147
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 149
A. CAPAIAN KINERJA 150
B. REALISASI ANGGARAN 215
BAB IV PENUTUP 222
A. KESIMPULAN. 222
B. TINDAK LANJUT 223
LAMPIRAN 224

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan mandat/amanat. Dengan demikian LKjIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian LKjIP kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.

Pada dasarnya laporan kinerja ini merupakan laporan kinerja tahunan yang disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati dan menyajikan informasi tentang rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud yang mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2029;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024–2026.
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024–2026.
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perubahannya;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2029;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
18. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/350/K/411.013/2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

C. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

I. Tugas Pokok

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

II. Fungsi

Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pengendalian dan pencegahan penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pengendalian dan pencegahan penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;
c. Pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pengendalian dan pencegahan penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupatu sesuai dengan tugas dan fungsinya

III. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Kesehatan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
4. Pembinaan aparatur;
5. Pengelolaan urusan kepegawaian;
6. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
7. Pelaksanaan kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah;
8. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah;
9. Pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
10. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Melaksanakan urusan persuratan;
2. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
3. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
4. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
5. Melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
6. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
2. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit

Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pengendalian dan pencegahan penyakit menular, pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pengendalian dan pencegahan penyakit menular, pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

2. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pengendalian dan pencegahan penyakit menular, pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pengendalian dan pencegahan penyakit menular, pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
4. Pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pengendalian dan pencegahan penyakit menular, pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan yang berkaitan dengan tugasnya.

d. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
2. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;

4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan yang berkaitan dengan tugasnya

e. Bidang Sumber Daya Kesehatan

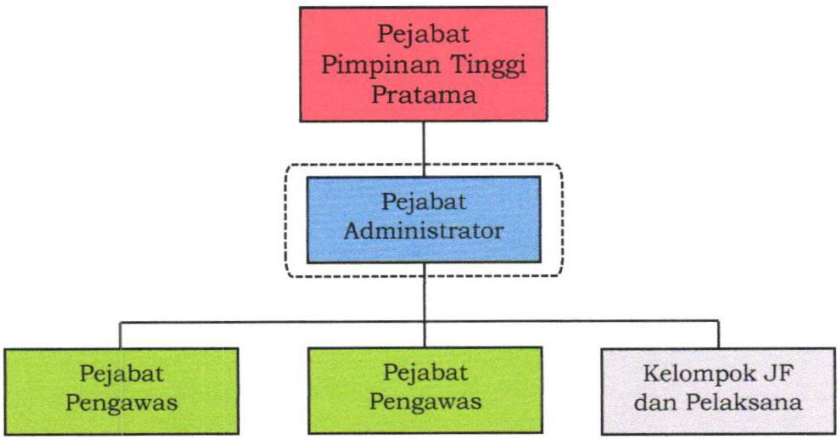
Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

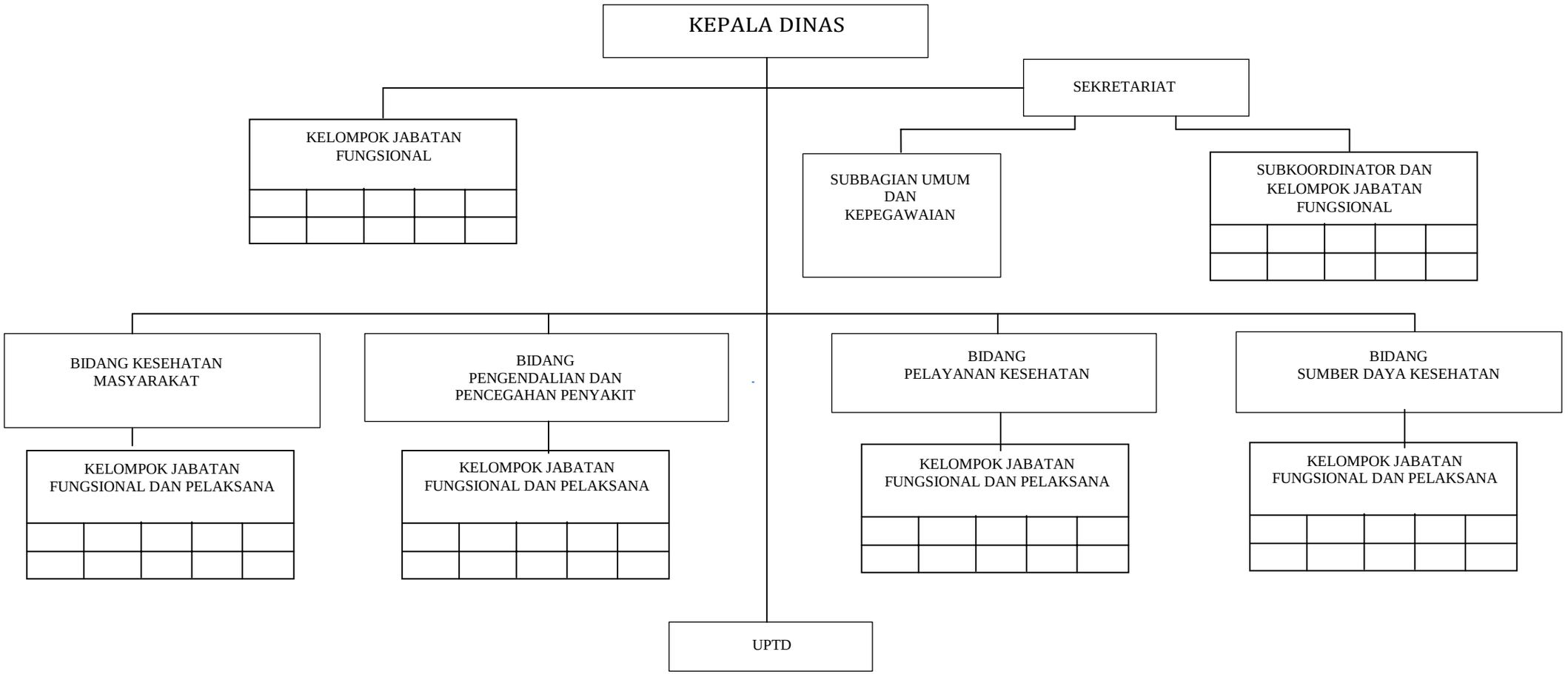
f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi Organisasi dengan Pejabat Level 1 adalah Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas). Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana berkedudukan dibawah Pejabat Administrator sebagai Pejabat Level 2 (Kepala Bidang) yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja.



Gambar 1.1 Sistem Kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KESEHATAN



Sumber Daya Manusia di Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan

No	Perangkat Daerah/Kecamatan	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
PNS				
1	Dinas Kesehatan	6		47
2	Puskesmas	0	777	59
PPPK				
1	Dinas Kesehatan	0	9	0
2	Puskesmas	0	220	0
Total Pegawai		6	1029	106

2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Dinkes		Puskesmas		Jumlah
		L	P	L	P	
1	IV c	0	1	3	2	6
2	IV b	0	0	9	6	15
3	IV a	2	5	7	18	32
4	III d	8	15	24	130	177
5	III c	1	12	14	72	99
6	III b	4	13	31	132	180
7	III a	1	7	12	124	144
8	II d	1	1	13	117	132
9	II c	2	2	26	72	102
10	II b	0	0	1	0	1
11	II a	0	0	0	1	1
12	I d	1	0	0	0	1
13	I c	0	0	0	0	0
14	I b	0	0	0	0	0
15	I a	0	0	0	0	0
16	VII (PPPK)	0	0	38	143	181
17	IX (PPPK)	4	5	2	12	23
18	X (PPPK)	0	0	10	14	24
Jumlah		**25**	**61**	**201**	**854**	**1141**

3. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

No	Perangkat Daerah/Kecamatan	Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir							
		SD	SMP	SMA	D I	D III	D IV	S1	S2
PNS									
1	Dinas Kesehatan	1	1	7	1	19	7	36	5
2	Puskesmas	0	3	54	10	500	98	169	2
PPPK									
1	Dinas Kesehatan	0	0	0	0	0	0	9	0
2	Puskesmas	0	0	0	0	182	4	34	0
Total Pegawai		1	4	61	11	701	109	248	7

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2024 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk yang selanjutnya disebut RSUD Nganjuk adalah rumah sakit kelas B yang merupakan unit organisasi bersifat khusus, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Susunan organisasi RSUD Nganjuk terdiri atas:

a. Direktur

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan rumah sakit. Dalam melaksanakan tugasnya, direktur menyelenggarakan fungsi:

1) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit;
2) Penetapan kebijakan;
3) Penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan
4) Kewenangannya;
5) Penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;
6) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksaraan
7) Tugas dan fungsi rumah sakit; dan
8) Evaluasi, pencatatan dan pelaporan.

b. Wakil Direktur Umum Dan Keuangan

Wakil direktur umum dan keuangan mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengoordinasikan, mengawasi, membina, dan mengevaluasi penyelenggaraan kesekretariatan, bagian umum, keuangan dan perencanaan. Dalam melaksanakan tugas, wakil direktur umum dan keuangan menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan pelaksanaan teknis kebijakan bagian umum, keuangan dan perencanaan;
2) Pemberian arahan dan petunjuk teknis di bagian umum, keuangan dan perencanaan;
3) Pendistribusian, pengoordinasian, pengendalian,
2) Pengawasan, evaluasi pelaksanaan tugas di bagian umum, keuangan dan perencanaan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Wakil direktur umum dan keuangan membawahkan :

1) Bagian Umum

   Bagian Umum mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, hukum dan hubungan masyarakat, pemasararl dan manajemen risiko, serta pengendalian mutu bagian umum.

2) Bagian Keuangan

   Bagian keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyusunan €rnggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset, serta manajemen risiko dan pengendalian mutu penatausahaan keuangan.

3) Bagian Perencanaan

   Bagian perencanaan mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengenddikan pelaksanaan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan, pengembangan sumber daya manusia, serta manajemen risiko dan pengendalian mutu perencanaan. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bagian perencanaan;

c. Wakil Direktur Pelayanan

Wakil direktur pelayanan mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengoordinasikan, mengawasi, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis, pelayanan penunjang non medis dan pengembangan pelayanan serta melaksanakan kendali mutu pelayanan. Dalam melaksanakan tugas, wakil direktur pelayanan menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan kebijakan dibidang pelayanan;
2) Pemberian arahan dan petunjuk teknis bidang pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis, pelayanan penunjang nonmedis dan pengembangan pelayanan serta melaksanakan kendali mutu pelayanan;
3) Pendistribusian, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan, eva-luasi bidang pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis, pelayanan penunjang nonmedis dan pengembangan pelayanan serta melaksanakan kendali mutu pelayanan;
4) Pelaksanaan kendali mutu dan keselamatan pasien dibidang pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis;
5) Pemantauan dan evaluasi dibidang pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang nonmedis;
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Wakil direktur pelayanan membawahkan :

1) Bidang Pelayanan

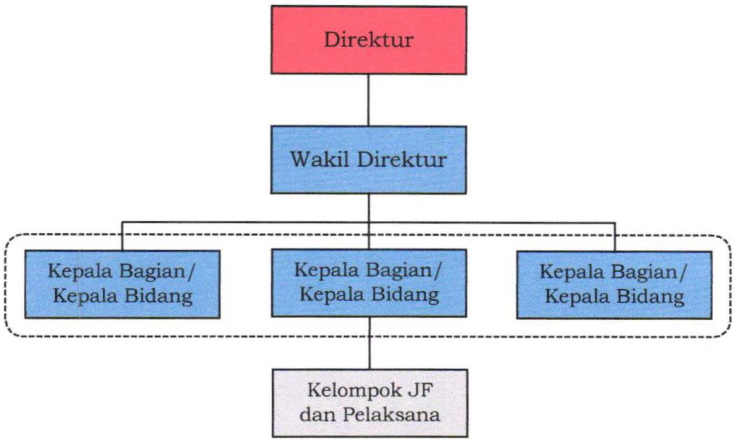
   Bidang pelayanan mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan medis, serta pelayanan keperawatan dan kebidanan, serta manajemen risiko dan pengendalian mutu pelayanan.

2) Bidang Pelayanan Penunjang

Bidang pelayanan penunjang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan penunjang medis, pelayanan penunjang nonmedis, dan pengendalian mutu pelayanan penunjang.

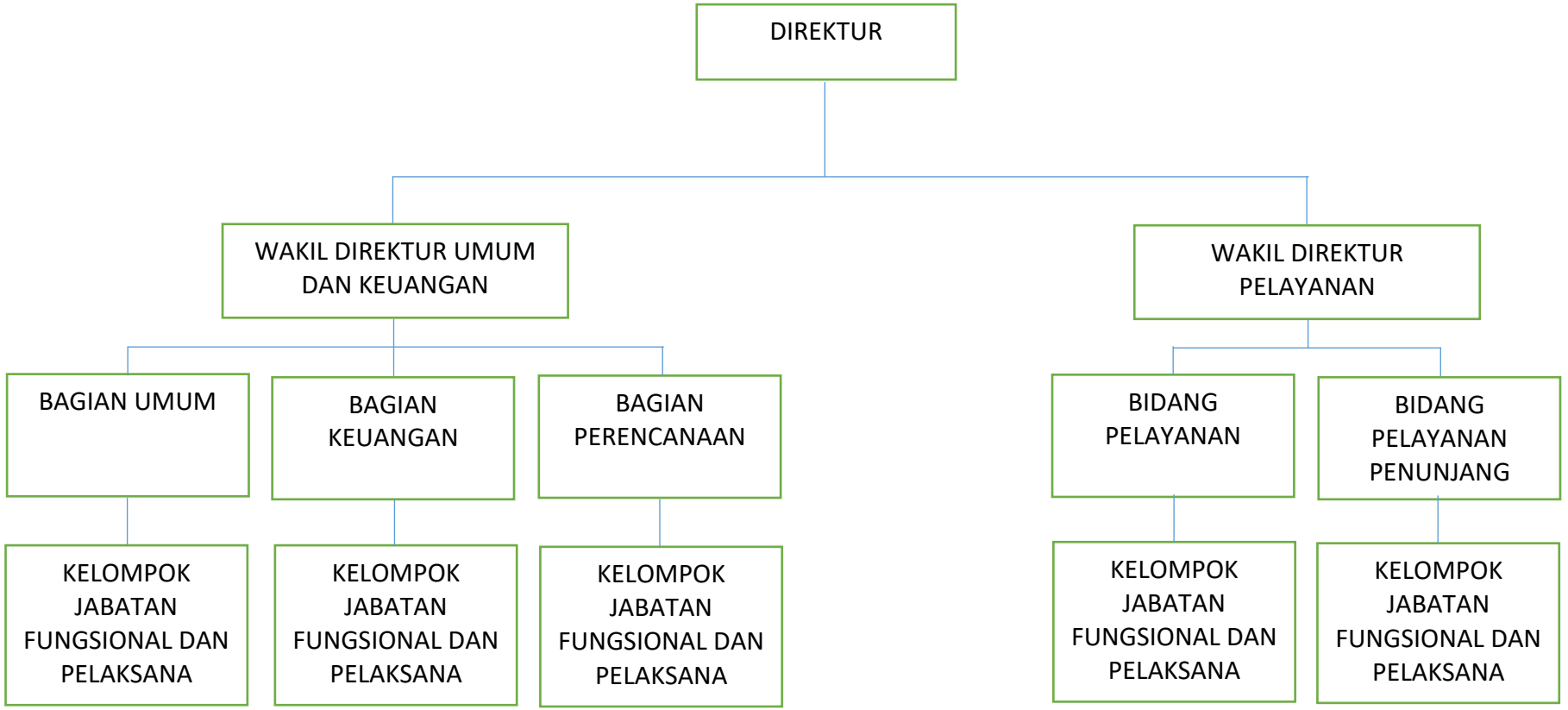
d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi Organisasi dengan Pejabat Level 1 adalah UOBK yang dipimpin oleh Direktur merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi pratama, dengan Kepala Bagian/Kepala Bidang sebagai Pimpinan Unit Organisasi sekaligus sebagai Pejabat Penilai Kinerja. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana berkedudukan di bawah Kepala Bagian/Kepala Bidang.



Gambar 1.2 Sistem Kerja pada UOBK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK



Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan semua orang yang terlibat dalam terciptanya sebuah produk layanan Rumah Sakit. Pada saat ini Rumah Sakit Daerah Nganjuk memiliki 3 kelompok SDM yang menunjang baik langsung maupun tidak langsung dalam pelayanan Rumah Sakit, yaitu : SDM Medis, SDM Paramedis, dan SDM Non Paramedis.

Data Sumber Daya Manusia RSD Nganjuk Tahun 2025

a. Jumlah PNS / CPNS / HONOR Menurut Golongan			
No.	**Uraian**	**Satuan**	**Jumlah**
1	Golongan IV/e	Orang	1
	Golongan IV/d	Orang	2
	Golongan IV/c	Orang	3
	Golongan IV/b	Orang	8
	Golongan IV/a	Orang	8
2	Golongan III/d	Orang	101
	Golongan III/c	Orang	81
	Golongan III/b	Orang	98
	Golongan III/a	Orang	23
3	Golongan II/d	Orang	62
	Golongan II/c	Orang	33
	Golongan II/b	Orang	4
	Golongan II/a	Orang	3
4	Golongan I/d	Orang	0
	Golongan I/c	Orang	0
	Golongan I/b	Orang	0
	Golongan I/a	Orang	0
5	Golongan X	Orang	41
	Golongan IX	Orang	16
	Golongan VII	Orang	192
6	Honor/Kontrak	Orang	141
Jumlah		Orang	817

b. Pejabat Struktural/Administrator			
No.	**Uraian**	**Satuan**	**Jumlah**
1	Eselon II	Orang	1
2	Eselon III	Orang	6
3	Eselon IV	Orang	0
Jumlah		Orang	7

c. Pejabat Fungsional			
No.	**Uraian**	**Satuan**	**Jumlah**
1	PNS	Orang	605
2	Non PNS	Orang	11
Jumlah		Orang	616

d. Pejabat Pelaksana			
No.	**Uraian**	**Satuan**	**Jumlah**
1	Golongan IV	Orang	0
2	Golongan III	Orang	41
3	Golongan II	Orang	23
4	Golongan I	Orang	0
5	Non PNS	Orang	130
Jumlah		Orang	194

e. Pendidikan Formal			
No.	**Uraian**	**Satuan**	**Jumlah**
1	Lulusan SD	Orang	1
2	Lulusan SLTP	Orang	5
3	Lulusan SLTA	Orang	157
4	Lulusan D-I	Orang	0
5	Lulusan D-II	Orang	0
6	Lulusan Sarmud/D-III	Orang	389
7	Lulusan S-1 / D-IV	Orang	180
8	Lulusan S-2	Orang	10
9	Lulusan S-3	Orang	0
10	Lulusan Kedokteran + Spesialis	Orang	59
11	Lulusan Apoteker	Orang	16
Jumlah		Orang	817

f. Penjenjangan			
No.	**Uraian**	**Satuan**	**Jumlah**
1	(SPATI) / Diklat Pim I	Orang	0
2	(SPADA) / Diklat Pim II	Orang	1
3	(SPAMA) / Diklat Pim III	Orang	5

g. Lulus Sertifikasi			
No.	**Uraian**	**Satuan**	**Jumlah**
1	Jabatan Fungsional Auditor Ahli	Orang	
2	Jabatan Fungsional Auditor Terampil	Orang	
3	Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	8

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2024 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono yang selanjutnya disebut RSUD Kertosono adalah rumah sakit kelas C yang merupakan unit organisasi bersifat khusus, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau palialif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Susunan organisasi RSUD Kertosono terdiri atas:

a. Direktur

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan rumah sakit. Dalam melaksanakan tugas, direktur menyelenggarakan fungsi:

1) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit;
2) Penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya;
3) Penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;
4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit; dan
5) Evaluasi, pencatatan dan pelaporan.

b. Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengoordinasikan, mengawasi, membina dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan kesekretariatan umum, perlengkapan, kepegawaian, sumber daya manusia, prograrn, perencanaan dan evaluasi. Bagian Tata Usaha membawahkan :

1) Subbagian Umum dan Perlengkapan

Subbagian umum dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pengendalian, pengawasan terkait umum dan perlengkapan.

2) Subbagian Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia

Subbagian Kepegawaian Dan Sumber Daya mempunyai tugas mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan terkait kepegawaian, dan sumber daya manusia.

3) Subbagian Program, Perencanaan, dan Evaluasi

Subbagian program, perencanaan dan evaluasi mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan program, perencanaan dan evaluasi.

c. Bidang Penunjangs

Bidang penunjang mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengoordinasikan, mengawasi, membina dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan seluruh kegiatan penunjang medis dan nonmedis. Bidang Penunjang mebawahkan :

1) Penunjang Medis

Penunjang medis mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan penunjang medis.

2) Penunjang Non Medis

Penunjang nonmedis mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan penunjang nonmedis.

d. Bidang Keuangan

Bidang keuangan mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengoordinasikan, mengawasi, membina dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan pertanggungiawaban anggaran dan keuangan. Bidang keuangan membawahkan :

1) Anggaran dan Pengelolaan Keuangan

Anggaran dan pengelolaan keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan anggaran dan pengelolaan keuangan.

2) Akuntansi, Aset dan Pelaporan

Akuntansi, aset dan pelaporan mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan akuntansi, aset dan pelaporan.

e. Bidang Pelayanan

Bidang pelayanan mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengoordinasikan, mengawasi, membina dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan.

1) Pelayanan Medis

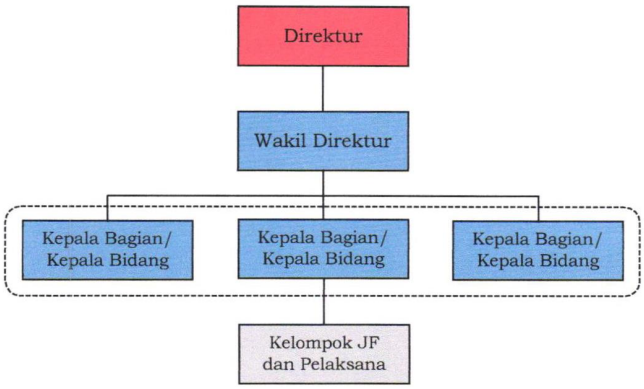
Pelayanan medis mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan pelayanan medis.

2) Pelayanan Keperawatan

Pelayanan keperawatan mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan pelayanan keperawatan.

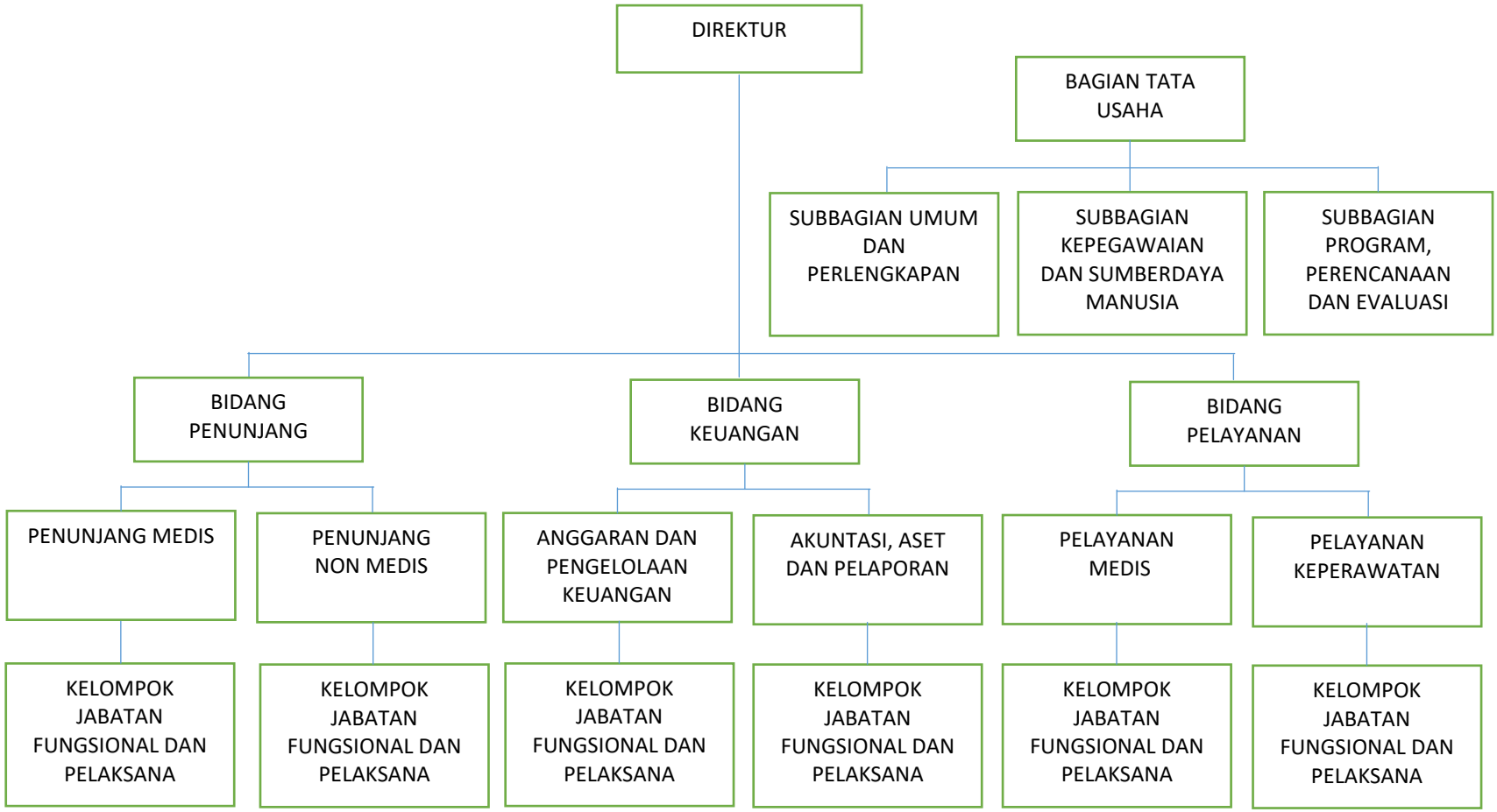
f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi Organisasi dengan Pejabat Level 1 adalah UOBK yang dipimpin oleh Direktur merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi pratama, dengan Kepala Bagian/Kepala Bidang sebagai Pimpinan Unit Organisasi sekaligus sebagai Pejabat Penilai Kinerja. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana berkedudukan di bawah Kepala Bagian/Kepala Bidang.



Gambar 1.2 Sistem Kerja pada UOBK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO



Saat ini RSD Kertosono Kabupaten Nganjuk memiliki 3 kelompok SDM berdasarkan status kepegawaiannya yaitu PNS, PPPK dan BLUD. Berikut penjabaran SDM RSD Kertosono berdasarkan status dan tingkat pendidikannya:

e. Pendidikan Formal			
No.	**Uraian**	**Satuan**	**Jumlah**
1	Lulusan SD	Orang	1
2	Lulusan SMP	Orang	3
3	Lulusan SLTA	Orang	97
4	Lulusan D-I	Orang	0
5	Lulusan D-II	Orang	0
6	Lulusan Sarmud/D-III	Orang	232
7	Lulusan S-1 / D-IV	Orang	129
8	Lulusan S-2	Orang	14
9	Lulusan Kedokteran + Spesialis	Orang	42
Jumlah		Orang	518

Sumber Data : Kepegawaian RSD Kertosono tahun 2024

Untuk kategori PNS, rincian SDM RSD Kertosono berdasarkan golongannya adalah sebagai berikut:

a. Jumlah PNS / CPNS / HONOR Menurut Golongan			
No.	**Uraian**	**Satuan**	**Jumlah**
1	Golongan IV/e	Orang	0
	Golongan IV/d	Orang	0
	Golongan IV/c	Orang	0
	Golongan IV/b	Orang	10
	Golongan IV/a	Orang	15
2	Golongan III/d	Orang	64
	Golongan III/c	Orang	32
	Golongan III/b	Orang	49
	Golongan III/a	Orang	15
3	Golongan II/d	Orang	93
	Golongan II/c	Orang	38
	Golongan II/b	Orang	6
	Golongan II/a	Orang	0
4	Golongan I/d	Orang	1
	Golongan I/c	Orang	1
	Golongan I/b	Orang	0
	Golongan I/a	Orang	0
5	Golongan X	Orang	12

a. Jumlah PNS / CPNS / HONOR Menurut Golongan			
No.	**Uraian**	**Satuan**	**Jumlah**
	Golongan IX	Orang	5
	Golongan VIII	Orang	0
	Golongan VII	Orang	81
6	Honor/Kontrak/BLUD/Non ASN	Orang	102
Jumlah		Orang	524

Sedangkan berdasarkan jabatannya, rincian pegawai ASN RSD Kertosono adalah sebagai berikut:

b. Pejabat Struktural/Administrator			
No.	**Uraian**	**Satuan**	**Jumlah**
1	Eselon II	Orang	0
2	Eselon III	Orang	5
3	Eselon IV	Orang	9
Jumlah		Orang	14

c. Pejabat Fungsional			
No.	**Uraian**	**Satuan**	**Jumlah**
1	PNS dan P3K	Orang	365
2	Non PNS	Orang	19
Jumlah		Orang	382

d. Pejabat Pelaksana			
No.	**Uraian**	**Satuan**	**Jumlah**
1	Golongan IV	Orang	0
2	Golongan III	Orang	10
3	Golongan II	Orang	28
4	Golongan I	Orang	2
5	Non PNS	Orang	83
Jumlah		Orang	127

D. ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026 Isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

1. Prioritas penganggaran pada program yang menunjang capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan

2. Pemenuhan standar jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan penunjang pelayanan dasar dan rujukan.
3. Pemenuhan kebutuhan obat, bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan pendukung capaian SPM.
4. Pemenuhan standar sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan pendukung capaian SPM.
5. Pemenuhan mutu dan akses pelayanan kesehatan sesuai standar dengan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.
6. Pengembangan Puskesmas menjadi PPK-BLUD;
7. Meningkatkan capaian kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat menuju *Universal Health Coverage.*
8. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor pemangku kepentingan di bidang kesehatan
9. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.

Sedangkan Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 Isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

1. Angka kematian ibu (AKI) masih tinggi
2. Angka Kematian Balita masih tinggi
3. Masih adanya Prevalensi Stunting
4. Angka Populasi Bebas Penyakit Menular dan tidak menular belum optimal
5. Penduduk dengan Aktivitas Fisik yang Cukup belum menyeluruh
6. Fasilitas Kesehatan Pemerintah Daerah belum seluruhnya Terakreditasi Paripurna
7. Sarana, prasarana dan alat kesehatan yang belum optimal
8. Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif belum menyeluruh
9. Distribusi SDM kesehatan belum merata
10. Belum semua Fasyankes Terintegrasi SIKN

11. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 didasarkan atas ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Nomor:000.8.6.3/67/411.000/2026 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Pada Bab ini minimal memuat:

A. Gambaran Umum/latar belakang
B. Landasan Hukum
C. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
D. Isu-isu Strategis *(strategic issued)* yang sedang dihadapi organisasi
E. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Pada Bab ini diuraikan tentang:

A. Ikhtisar/ringkasan renstra/renja
B. Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun berkenaan (n)
2. Perbandingan realisasi kinerja tahun berkenaan (n) dan tahun sebelumnya
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun berkenaan (n) dengan target akhir pada dokumen renstra
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun berkenaan (n) dengan standard nasional (minimal dengan regional/ provinsi/ kabupaten yang berbatasan)
5. Analisis keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1) Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2) Indikator Kinerja Utama (IKU)
3) Dokumen Penganggaran (DPA)
4) Bukti Dukung Lain

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. IKHTISAR /RINGKASAN RENSTRA

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Nagnjuk 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu 2024-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif.

Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang disusun memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2024-2029. Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD yaitu Indeks kesehatan dengan sasaran Meningkatnya Kesehatan Masyarakat, berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang. Indikator berikut merupakan indikator program yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk mengacu pada tujuan RPD yaitu Indeks kesehatan.

Tabel 2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

(Berdasarakan Renstra Dinas Kesehatan 2024-2026)

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
							2024	2025	2026
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan			Indeks	0,8	0,8	0,8	0,8
			Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Umur Harapan Hidup	Nilai	72,18	72,34	72,5	72,66
				Universal Health Coverage (UHC)	Persentase	77,23	78	80	80,5
2	Meningkatnya derajat kesehatan keluarga	Indeks Keluarga Sehat			Indeks	0,8	0,8	0,8	0,8
			Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga berdasarkan Siklus Hidup	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 kelahiran hidup	183	183	183	180
				Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 kelahiran hidup	16	16	16	16
				Prevalensi Penyakit (Insidensi TB)	per 100.000 penduduk	201	201	201	171

Tabel 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025
(Berdasarakan Renstra Dinas Kesehatan 2025-2029)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan											
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	74.64	74.76	75.01	75.27	75.53	75.78	76.04	
		Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	22.8	18.8	17.5	16.3	15.2	14.2	14.2	
			Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	90.52	94.34	86.48	78.62	78.62	70.75	70.75	
			Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	11.41	9.67	9.59	9.34	8.84	8.67	8.51	

		Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (%)	30	40	50	60	70	80	80	
			Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (%)	15	30	40	50	55	60	60	
		Meningkatnya Gaya Hidup Sehat	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik yg cukup (%)	65	65	68	71	75	80	80	
		Meningkatnya Layanan Kesehatan Baik dan Inklusif	Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%)	95	95	95	95	95	100	100	
			Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif (%)	80	80	80.5	81.5	82.5	83.5	84.5	
		Meningkatnya Integrasi Layanan Kesehatan	Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN (%)	22.9	28.99	43.48	57.97	72.46	86.96	100	

Dalam upaya pencapaian target pada Rencana Strategis Tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk didukung oleh beberapa program dan kegiatan yang tampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Program, Kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Ngajuk Tahun 2025
(Berdasarakan Renstra Dinas Kesehatan 2024-2026)

No	Sasaran Strategis	IKU	Program	Kegiatan
1.	Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga berdasarkan Siklus Hidup	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)		2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Prevalensi Penyakit (Insidensi TB) (per 100.000 penduduk)		3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
				4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				5. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
			2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
				2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				3. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
			3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
				2. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan

No	Sasaran Strategis	IKU	Program	Kegiatan
				Depot Air Minum (DAM)
				3. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
				4. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				2. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				3.

Dan satu program pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 9 kegiatan yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Peningkatan Pelayanan BLUD

Tabel 2.2.1 Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Program, Kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Ngajuk Tahun 2025
(Berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan 2025-2029)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
		Meningkatnya kesehatan ibu dan anak			Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))		
					Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)		
					Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran)		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu		Cakupan kunjungan nifas (KF) lengkap sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

					Persentase anemia pada ibu hamil (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Presentase kabupaten kota dengan CFR direct obstetric (eklampsi dan perdarahan post partum <1%) (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
				Terlaksnanya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
			Meningkatnya Pelayanan Gizi masyarakat		Insiden Stunting pada Balita (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase anak usia 6-23 Bulan mendapatkan MPASI (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Bayi 6 Bulan mendapatkan ASI eksklusif (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

					Presentase Bumil KEK (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Prevalensi wasting pada balita (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Terlaksananya pelayanan kesehatan pada balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
				Terlaksananya pelayanan kesehatan pada remaja	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya pelayanan gizi pada masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada anak		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

					Angka Kematian Neonatal (per 1000 kelahiran hidup) (Per 1.000 Kelahiran)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Terlaksananya pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
		Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (%)		
					Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (%)		

			Meningkatnya air minum aman, Meningkatnya kualitas SKUDR Permukiman, Meningkatnya pemberdayaan kesehatan berbasis masyarakat		Desa ber-STBM Lima Pilar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Jumlah Permukiman yang memenuhi syarat (Satuan Permukiman (SP))	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Sarana Air Minum yang memenuhi syarat (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan sarana air minum, SKUDR pada Permukiman, Desa Ber-STBM 5 Pilar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
			Meningkatnya tingkatan kabupaten sehat		Tingkatan Kabupaten Sehat (Predikat)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tercapainya Kabupaten Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	

			Meningkatnya upaya kesehatan jiwa		Prevalensi depresi pada usia lebih dari sama dengan 15 Tahun (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya skrining kesehatan jiwa dan napza	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
				Meningkatnya pelayanan kesehatan pada orang penyandang gangguan jiwa	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	

				Meningkatnya pelayanan kesehatan pada ODGJ berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya deteksi dini faktor resiko penyakit, Menurunnya risiko penyakit degeneratif		Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis pada semua kelompok umur (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

					Prevalensi Obesitas >18 Tahun (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Terlaksananya pemeriksaan kesehatan gratis pada semua kelompok umur	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	

					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
			Meningkatnya angka populasi bebas penyakit tidak menular		Presentase DM dalam pengendalian (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Presentase hipertensi dalam pengendalian (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

					Presentase Puskesmas melaksanakan upaya berhenti merokok (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat pada upaya penecegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	1.02.02.2.01.0024 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	

				Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat pada upaya penecegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*

					Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	1.02.02.2.02.0043 - Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	
			Meningkatnya kekebalan kelompok, Menurunnya kasus keracunan pangan		Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Jumlah kasus keracunan pangan (Kasus)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

				Meningkatnya kekebalan kelompok usia bayi,balita,anak sekolah dan dewasa	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	1.02.02.2.02.0036 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
				Meningkatnya penemuan kasus PD3I	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	

					Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	1.02.02.2.02.0037 - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	
			Meningkatnya angka populasi bebas penyakit menular		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Annual parasite insdence malaria per 1000 penduduk (Per 1000 Penduduk)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

					Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Insidensi HIV per 1000 penduduk (Per 1000 Penduduk)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Insidensi TBC per 100.000 penduduk (Angka)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Presentase kematian akibat dengue (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

				Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat pada upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	

					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
		Meningkatnya Gaya Hidup Sehat			Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik yg cukup (%)		
			Meningkatnya upaya gaya hidup sehat pada masyarakat		Persentase Pustu dan Puskesmas yang menyelenggarakan program aktifitas fisik (%)	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*

				Terlaksananya upaya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Ko	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
				Terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat (Keluarga)	1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat (Keluarga)	1.02.05.2.02.0002 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
				Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
		Meningkatnya Layanan Kesehatan Baik dan Inklusif			Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif (%)		
					Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%)		
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerahh		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.02.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

			Terpenuhinya perbekalan kesehatan sesuai standar difasyankes		Persentase faskes primer dengan Obat, Vaksin dan BMHP sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Terpenuhinya Obat, BHP, BMHP, Vaksin di Fasyankes	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
				Terlaksananya pelaksanaan Distribusi Obat,BHP,BMHP,Vaksin di Fasyankes	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
			Meningkatnya mutu layanan primer dan labkesmas tk-2, Meningkatnya kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan		IKM Layanan Kesehatan RSUD, Puskesmas, dan Labkesmas Tk-2) (Nilai)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Labkesmas Tk 2 yang mencapai target INM (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Puskesmas yang mencapai target INM (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

				Terlaksananya INM Puskemas (20 kecamatan)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya INM Labkesda	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	

				Terlaksananya INM Puskemas (20 kecamatan)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
			Meningkatnya perlindungan kesehatan		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Terlaksananya pengelolaan Jaminan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	

			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Dinas Kesehatan)		Persentase Labkesmas Tk 2 dengan SPA sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase RS Pemda dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas	
					Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
					Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*

					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0007 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
					Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	1.02.02.2.01.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	1.02.02.2.01.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	

					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
				Terlaksananya monev capaian SPA faskes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0024 - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	1.02.02.2.02.0030 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	

					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
				Terlaksananya monev capaian SPA faskes	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	1.02.02.2.04.0004 - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
			Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan		Rasio nakes dan named sesuai populasi (Rasio)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	

				Terlaksananya pembinaan dan pengawasan perizinan praktik tenaga kesehata	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.01.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
				Terpenuhinya Kebutuhan SDM kesehatan di fasyankes sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan SDM kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi SDM Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman		Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Terlaksananya pemeriksaan sediaan farmasi pada sarana pelayanan kefarmasian	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*

					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
				Terlaksananya Pemeriksaan Pangan Pre Market di sarana industri rumah tangga pangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	

					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
				Terlaksananya penerbitan SLHS TPM antara lain jasa boga,rumah makan,restoran dan DAM	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	

					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Pemeriksaan Pangan Lanjutan pada sarana ritel pangan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	

					Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
		Meningkatnya Integrasi Layanan Kesehatan			Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN (%)		
			Meningkatnya fasyankes yang sudah terdaftar di SIKN dengan status memiliki RME		Prosentase fasyankes sudah terdaftar di SIKN dengan status memiliki RME (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Terlaksananya fasyankes sudah terdaftar di SIKN dengan status memiliki RME	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
1.02.0.00.0.00.01.0001 - Puskesmas Bagor							

- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
		Meningkatnya Layanan Kesehatan Baik dan Inklusif			Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif (%)		
					Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%)		
			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Bagor		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Bagor)		Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0002 - Puskesmas Baron							
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		

		Meningkatnya Layanan Kesehatan Baik dan Inklusif			Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif (%)		
					Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%)		
			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Baron		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Baron	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Baron)		Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0003 - Puskesmas Berbek							
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		

		Meningkatnya Layanan Kesehatan Baik dan Inklusif			Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif (%)		
					Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%)		
			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Berbek		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Berbek)		Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0004 - Puskesmas Gondang							
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
		Meningkatnya Layanan Kesehatan Baik dan Inklusif			Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif (%)		
					Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%)		

			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Gondang		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Gondang)		Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0005 - Puskesmas Jatikalen							
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
		Meningkatnya Layanan Kesehatan Baik dan Inklusif			Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif (%)		
					Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%)		

			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Jatikalen		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*

			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Jatikalen)		Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0006 - Puskesmas Kertosono							
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
		Meningkatnya Layanan Kesehatan Baik dan Inklusif			Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif (%)		
					Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%)		

			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Kertosono		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Kertosono)		Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

				Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0007 - Puskesmas Lengkong							
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
		Meningkatnya Layanan Kesehatan Baik dan Inklusif			Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif (%)		
					Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%)		

			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Lengkong		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Lengkong)		Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

				Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0008 - Puskesmas Loceret							
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
		Meningkatnya Layanan Kesehatan Baik dan Inklusif			Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif (%)		
					Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%)		
			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Loceret		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Loceret)		Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

				Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0009 - Puskesmas Nganjuk							
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
		Meningkatnya Layanan Kesehatan Baik dan Inklusif			Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif (%)		
					Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%)		
			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Nganjuk		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

					Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Nganjuk)		Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

				Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0010 - Puskesmas Ngetos							
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
		Meningkatnya Layanan Kesehatan Baik dan Inklusif			Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif (%)		
					Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%)		
			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Ngetos		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

					Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Ngetos)		Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	

1.02.0.00.0.00.01.0011 - Puskesmas Ngluyu							
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
		Meningkatnya Layanan Kesehatan Baik dan Inklusif			Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif (%)		
					Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%)		
			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Ngluyu		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas ngluyu)		Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0012 - Puskesmas Ngronggot							
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		

		Meningkatnya Layanan Kesehatan Baik dan Inklusif			Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif (%)		
					Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%)		
			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Ngronggot		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	

					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas ngronggot)		Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0013 - Puskesmas Pace							
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
		Meningkatnya Layanan Kesehatan Baik dan Inklusif			Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif (%)		

					Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%)		
			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Pace		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*

			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Pace)		Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0014 - Puskesmas Patianrowo							
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
		Meningkatnya Layanan Kesehatan Baik dan Inklusif			Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif (%)		
					Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%)		

			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Patianrowo		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Patianrowo)		Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

				Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0015 - Puskesmas Prambon							
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
		Meningkatnya Layanan Kesehatan Baik dan Inklusif			Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif (%)		
					Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%)		

			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Prambon		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas prambon)		Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

				Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0016 - Puskesmas Rejoso							
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
		Meningkatnya Layanan Kesehatan Baik dan Inklusif			Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif (%)		
					Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%)		
			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Rejoso		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Rejoso)		Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

				Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0017 - Puskesmas Sawahan							
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
		Meningkatnya Layanan Kesehatan Baik dan Inklusif			Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif (%)		
					Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%)		
			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Sawahan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

					Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Sawahan)		Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

				Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0018 - Puskesmas Sukomoro							
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
		Meningkatnya Layanan Kesehatan Baik dan Inklusif			Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif (%)		
					Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%)		
			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Sukomoro		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

					Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Sukomoro)		Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	

1.02.0.00.0.00.01.0019 - Puskesmas Tanjunganom							
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
		Meningkatnya Layanan Kesehatan Baik dan Inklusif			Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif (%)		
					Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%)		
			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Tanjunganom		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Tanjunganom)		Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0020 - Puskesmas Wilangan							
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		

		Meningkatnya Layanan Kesehatan Baik dan Inklusif			Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif (%)		
					Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%)		
			Meningkatnya Kepuasan layanan dan mutu layanan Primer Puskesmas Wilangan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Puskesmas (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Indeks Nasional Mutu (INM) (Nilai)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	

					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Puskesmas Wilangan)		Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
1.02.0.00.0.00.01.0021 - Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk							
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
		Meningkatnya Layanan Kesehatan Baik dan Inklusif			Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif (%)		

					Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%)		
			Meningkatnya mutu layanan rujukan dan kemandirian keuangan BLUD RSUD Nganjuk		BOR (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					CRR (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan RSUD Nganjuk (Indeks)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Nasional Mutu (INM) Kecepatan Waktu Tanggap Komplain (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Identifikasi Pasien (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Kebersihan Tangan (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Penggunaan APD (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan penggunaan formularium nasional (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

					Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Terhadap Alur klinis (Clinical Pathway) (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Nasional Mutu (INM) Kepuasan Pasien (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Nasional Mutu (INM) Ketepatan Waktu Visite Dokter (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Nasional Mutu (INM) Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Nasional Mutu (INM) Penundaan Operasi Elektif (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

					Indeks Nasional Mutu (INM) Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Nasional Mutu (INM) Waktu Tunggu Rawat Jalan (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					NDR (Per 1000 Penduduk)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					TOI (Hari)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (RSUD Nganjuk)		Persentase RS Pemda dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

				Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit&	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit	
1.02.0.00.0.00.01.0022 - Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono							
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
		Meningkatnya Layanan Kesehatan Baik dan Inklusif			Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif (%)		
					Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%)		

			Meningkatnya mutu layanan rujukan dan kemandirian keuangan BLUD RSUD Kertosono		BOR (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					CRR (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Pelayanan RSUD Kertosono (Indeks)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Nasional Mutu (INM) Kecepatan Waktu Tanggap Komplain (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

					Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Identifikasi Pasien (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Kebersihan Tangan (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Penggunaan APD (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan penggunaan formularium nasional (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Terhadap Alur klinis (Clinical Pathway) (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Nasional Mutu (INM) Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

					Indeks Nasional Mutu (INM) Kepuasan Pasien (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Nasional Mutu (INM) Ketepatan Waktu Visite Dokter (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Nasional Mutu (INM) Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Nasional Mutu (INM) Penundaan Operasi Elektif (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*

					Indeks Nasional Mutu (INM) Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Nasional Mutu (INM) Waktu Tunggu Rawat Jalan (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					NDR (Per 1000 Penduduk)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					TOI (Hari)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (RSUD Kertosono)		Persentase RS Pemda dengan SPA Sesuai Standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasaran, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit	

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan bagian dari rencana kinerja tahunan yang menjadi bagian terpenting bagi pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan Daerah karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Tabel 2.4.1 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga berdasarkan Siklus Hidup	1. Angka Kematian Ibu (AKI) 2. Angka Kematian Bayi (AKB) 3. Prevalensi Penyakit (Insidensi Tuberkulosis)	1. 183 per 100.000 kelahiran hidup 2. 16 per 1000 kelahiran hidup 3. 201 per 100.000 penduduk

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 163.431.087.590	APBD
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 138.318.707.560	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 1.577.402.200	APBD
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp. 1.266.156.500	APBD
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 2.361.838.674	APBD

Tabel 2.4.2 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak	1. Angka Kematian Ibu (AKI) 2. Angka Kematian Balita 3. Prevalensi Stunting (%)	1. 94,34 per 100.000 kelahiran hidup 2. 9,67 per 1000 kelahiran hidup 3. 18,8 %
2	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (%) 2. Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (%)	1. 40 % 2. 30 %
3	Meningkatnya Gaya Hidup Sehat	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik yang Cukup (%)	65 %
4	Meningkatnya Layanan Kesehatan Baik dan Inklusif	1. Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%) 2. Persentase Masyarakat memiliki Asuransi Kesehatan Aktif (%)	1. 95 % 2. 80 %
5	Meningkatnya Integrasi Layanan Kesehatan	Proporsi Fasyankes Terintegrasi SIKN (%)	28,99 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 163.431.087.590	APBD
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 138.318.707.560	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 1.577.402.200	APBD
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp. 1.266.156.500	APBD
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 2.361.838.674	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan Renstra 2025-2029, dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2025 dan Penetapan Kinerja 2025. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2025 dalam rangka pencapaian Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang memiliki visi “Nganjuk yang Maju, Adil, dan Sejahtera”, untuk mendukung visi tersebut Dinas Kesehatan termasuk dalam misi ke-3 yaitu Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, adalah menyelenggarakan pembangunan daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyararakat, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok, kecamatan, desa dan kelurahan yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara efektif; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk gender. Di samping itu pemenuhan hak-hak dasar masyarakat semakin ditingkatkan, seperti layanan kesehatan, akses pendidikan, pembangunan perumahan, memperkuat sistem jaminan sosial, peningkatan upah tenaga kerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang memiliki visi “Nganjuk Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”, untuk mendukung visi tersebut Dinas Kesehatan termasuk dalam misi ke-4 yaitu Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas*”.* Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Maju” , “Sejahtera”, dan “Bermartabat”, berfokus pada pengembangan manusia sebagai aset utama dalam kemajuan daerah. Sementara dalam bidang kesehatan, pelayanan yang bermutu mencakup ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, tenaga medis yang profesional, serta akses layanan kesehatan yang lebih mudah dan merata. Kesehatan yang baik akan mendukung produktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sinergi antara pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, masyarakat dapat berkembang secara optimal, baik dari segi intelektual maupun fisik. Hal ini akan menciptakan sumber daya manusia yang

unggul, produktif, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan (baik kuantitatif maupun kualitatif) yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah sasaran telah tercapai. Oleh karena itu, pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dapat dilakukan dengan menilai seberapa jauh indikator kinerja telah tercapai. Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Metode Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan gap analysis, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Capaian	Kriteria
1.	≥ 91%	Tercapai
2.	80% ≤ 90%	Tercapai dengan catatan
3.	< 80%	Tidak tercapai

A. CAPAIAN KINERJA

A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Setiap akhir periode, dilakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja, pengukuran terhadap kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel 3.1.1 Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan	Target Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian
1	Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga berdasarkan Siklus Hidup	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Renstra 2024-206	183	106.28	172,18%
		Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Renstra 2024-206	16	8	200%
		Prevalensi Penyakit (Insidensi TB) (per 100.000 penduduk)	Renstra 2024-206	201	127	158,26%

Tabel 3.1.1 Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan	Target Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian
1	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	Renstra 2025-2029	18,8	22,8	82,45%
		Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	Renstra 2025-2029	94,34	106,28	88,76%
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Renstra 2025-2029	9,67	8,40	115,11%
2	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (%)	Renstra 2025-2029	40	40	100%
		Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	Renstra 2025-2029	30	100	333%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan	Target Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian
		(%)				
3	Meningkatnya Gaya Hidup Sehat	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik yg cukup (%)	Renstra 2025-2029	65	78,9	121,38%
4	Meningkatnya Layanan Kesehatan Baik dan Inklusif	Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%)	Renstra 2025-2029	95	95	100%
		Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif (%)	Renstra 2025-2029	80	79,06	98,82%
5	Meningkatnya Integrasi Layanan Kesehatan	Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN (%)	Renstra 2025-2029	28,99	50,79	175,19%

Sesuai dengan tabel di atas, evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dapat dijelaskan sesuai dengan indikator dalam Renstra Dinas Kesehatan tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Realisasi Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2025 dengan target 183 (per 100.000 kelahiran hidup) terealisasi sebesar 106,28 (per 100.000 kelahiran hidup) sehingga didapatkan capaian 172,18%. Data tersebut didapatkan dari data *Maternal Perinatal Death Notification* (MPDN). Capaian ini merupakan capaian negatif sehingga apabila berada dibawah target maka dianggap kematian ibu di Kabupaten Nganjuk rendah.
2. Realisasi Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2025 dengan target 16 (per 1000 kelahiran hidup) terealisasi sebesar 8 (per 1000 kelahiran hidup) sehingga didapatkan capaian 200%. Data tersebut didapatkan dari data *Maternal Perinatal Death Notification* (MPDN). Capaian ini merupakan capaian negative sehingga apabila berada dibawah target maka dianggap kematian bayi di Kabupaten Nganjuk rendah.
3. Realisasi Prevalensi Penyakit (Insidensi TB) (per 100.000 penduduk) tahun 2025 dengan target 201 ((per 100.000 penduduk) terealisasi 127 (per 100.000 penduduk) sehingga didapatkan capaian 158,26%. Data tersebut didapatkan dari data Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB). Capaian ini memang tergolong rendah dikarenakan

kurangnya jumlah penemuan kasus Tuberkulosis di Kabupaten Nganjuk yang hanya mencapai 1.451 dibandingkan jumlah penduduk sebesar 1.138.604 jiwa.

Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Triwulan IV Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029

Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator tujuan Usia Harapan Hidup dimana target Usia Harapan Hidup tahun 2025 adalah 74.76 dengan realisasi Usia Harapan Hidup 74.96.

Adapun Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesehatan ibu dan anak

   Pada sasaran meningkatnya kesehatan ibu dan anak mempunyai 3 indikator kinerja sebagai berikut:

   a. Angka Kematian Ibu (AKI)

      Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan komplikasi obstretik atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

      Realisasi Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2025 adalah 106,28 per 100.000 Kelahiran Hidup dari target 94.34 per 100.000 Kelahiran Hidup sehingga capaiannya 88.76%. Dimana jumlah kematian ibu pada tahun 2025 sebanyak 11 orang dari 10.350 Kelahiran Hidup.

   b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)

      Realisasi Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) tahun 2025 adalah 22.80 % dari target 18.80% sehingga capaiannya 82.45%. Dimana penghitungan realisasi didapatkan dari hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024.

   c. Angka Kematian Balita

      Realisasi Angka Kematian Balita (AKABA) tahun 2025 adalah 8.41 per 1.000 Kelahiran Hidup dari target 9.67 per 1.000 Kelahiran Hidup sehingga capaiannya 115.11%. Dimana jumlah kematian balita pada tahun 2025 sebanyak 87 orang dari 10.350 Kelahiran Hidup.

2. Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

   Pada sasaran meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai 2 indikator kinerja sebagai berikut:

   a. Angka Populasi Bebas Penyakit Menular

      Realisasi Angka Populasi Bebas Penyakit Menular adalah 40% dari target 40% sehingga capaiannya 100%. Dimana 20 kecamatan di kabupaten nganjuk telah melakukan tata laksana kasus malaria sesuai standar cakupan ODHIV ditemukan

dan mulai pengobatan ARV minimal 90% serta angka keberhasilan pengobatan TBC >90%. 16 kecamatan lainya telah melaksanakan namun belum mencapai target yang ditentukan.

b. Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular

Realisasi Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular adalah 100% dari target 30% sehingga capaiannya 333%. Dimana 20 kecamatan di kabupaten nganjuk telah mencapai indeks SPM hipertensi dan diabetes melitus 80% serta melaksanakan upaya berhenti merokok.

3. Meningkatnya Gaya Hidup Sehat

Pada sasaran meningkatnya gaya hidup sehat mempunyai indikator kinerja Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik yang cukup dengan realisasi 78.9% dari target 65% dengan capaiannya 121.38% dimana penghitungan Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik yang cukup didapatkan dari hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023.

4. Meningkatnya Layanan Kesehatan Baik dan Inklusif

Pada sasaran meningkatnya layanan kesehatan baik dan inklusif mempunyai indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif

Asuransi kesehatan aktif merupakan perlindungan kesehatan dan memberikan manfaat kepada pemegangnya. Pada Tahun Anggaran 2025, persentase masyarakat yang tercatat memiliki asuransi kesehatan aktif mencapai 79.06% belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 80% sehingga capaiannya 98.82%.

b. Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna

Fasilitas kesehatan (faskes) terakreditasi paripurna adalah tingkat akreditasi tertinggi yang diberikan kepada rumah sakit (RS) atau puskesmas karena telah memenuhi semua standar mutu, manajemen, dan keselamatan pasien yang sangat tinggi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) atau lembaga akreditasi independen, menunjukkan pelayanan komprehensif (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) yang berfokus pada kepuasan dan keamanan pasien. Pencapaian ini menjadi bukti kualitas terbaik dan komitmen terus-menerus dalam peningkatan layanan kesehatan di Indonesia.

Realisasi Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna Tahun 2025 adalah 95% dari target 95% sehingga capaiannya 100%. Dimana 2 RS Pemerintah Daerah dan 19 Puskesmas sudah terakreditasi paripurna sedangkan 1 Puskesmas status akreditasi masih Utama.

5. Meningkatnya Integrasi Layanan Kesehatan

Pada sasaran meningkatnya integrasi layanan kesehatan mempunyai indikator Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN. Fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan) yang terdaftar

di Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN) dengan status memiliki RME berarti fasilitas tersebut telah menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME) dalam operasional layanannya.

Realiasi fasyankes terintegrasi SIKN dengan status memiliki RME tahun 2025 adalah 50.79% dari target 28.99% sehingga capaiannya 175.19%. Dimana fasyankes yang terdaftar pada aplikasi satu sehat dan terintegrasi dengan SIKN sampai dengan desember 2025 adalah 191 fasyankes yang terdiri dari 4 Rumah Sakit, 20 Puskesmas, 44 Klinik, 5 Laboratorium, 85 Dokter Umum, 30 Dokter Gigi, 3 Dr Spesialis. Dari 191 fasyankes tersebut yang terintegrasi SIKN dengan status memiliki RME sebanyak 97 fasyankes yang terdiri dari 4 RS, 20 Puskesmas, 36 Klinik, 26 Dokter Umum, 11 Dokter Gigi.

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Dokumen	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga berdasarkan siklus hidup	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Renstra 2024-2026	-	-	183	183	-	-	90	106.28
		Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	Renstra 2024-2026	-	-	16	16	-	-	10	8
		Prevalensi Penyakit (Insidensi TB) (per 100.000 penduduk)	Renstra 2024-2026			201	201			130	127
2	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	Renstra 2025-2029	-	-	-	94.34	-	-	-	106.28
		Prevalensi Stunting	Renstra 2025-	-	-	-	18.80	-	-	-	22.8

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Dokumen	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
		(pendek dan sangat pendek) (%)	2029								
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran)	Renstra 2025-2029	-	-	-	9.67	-	-	-	8.40
3	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (%)	Renstra 2025-2029	-	-	-	40	-	-	-	20
		Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (%)	Renstra 2025-2029	-	-	-	30	-	-	-	90
4	Meningkatnya Gaya Hidup Sehat	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik yg cukup (%)	Renstra 2025-2029	-	-	-	65	-	-	-	78.9
5	Meningkatnya Layanan Kesehatan Baik dan Inklusif	Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif (%)	Renstra 2025-2029	-	-	-	80	-	-	-	79.06
		Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%)	Renstra 2025-2029	-	-	-	95	-	-	-	95
6	Meningkatnya Integrasi Layanan Kesehatan	Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN (%)	Renstra 2025-2029	-	-	-	28.99	-	-	-	50.79

Sesuai tabel diatas bahwa realisasi kinerja tahun sebelumnya dan tahun 2025 tidak bisa dibandingkan dikarenakan perbedaan atau perubahan pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan yang menyesuaikan perubahan renstra 2024 -2026 dan renstra tahun 2025-2029 Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.

A.3 Target Kinerja berdasarkan Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029

Tabel 3.1.3.1 Target Kinerja Renstra 2024-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Data capaian tahun awal	Target Indikator Kinerja Sasaran						
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga berdasarkan Siklus Hidup	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)		183	183	183				
		Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)		16	16	16				
		Prevalensi Penyakit (Insidensi TB) (per 100.000 penduduk)		201	201	201				

Tabel 3.1.3.1 Target Kinerja Renstra 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Data capaian tahun awal	Target Indikator Kinerja Sasaran						
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000	-	90,52	95,34	86,48	78,62	78,62	70,75	70,75

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Data capaian tahun awal	Target Indikator Kinerja Sasaran						
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		kelahiran hidup))								
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran)	-	11,41	9.67	9,59	9,34	8,84	8,67	8,51
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	-	22,8	18,8	17,5	16,3	15,2	14,2	14,2
	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (%)	-	30	40	50	60	70	80	80
		Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (%)	-	15	30	40	50	55	60	60
	Meningkatnya Gaya Hidup Sehat	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik yg cukup (%)	-	65	65	68	71	75	80	80
	Meningkatnya Layanan Kesehatan Baik dan Inklusif	Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif (%)	-	80	80	80,5	81,5	82,5	83,5	84,5

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Data capaian tahun awal	Target Indikator Kinerja Sasaran					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%)	-	95	95	95	95	95	100	100
	Meningkatnya Integrasi Layanan Kesehatan	Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN (%)	-	22,9	28,99	43,48	57,97	72,46	86,96	100

Tabel 3.1.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun Akhir Renstra	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Kemajuan(%)
	Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga berdasarkan Siklus Hidup	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	183	106,28	172,18%
		Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	16	8	200%
		Prevalensi Penyakit (Insidensi TB) (per 100.000 penduduk)	201	127	158,26%

Tabel 3.1.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Target Akhir Renstra 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun	Realisasi Kinerja	Tingkat Kemajuan(%)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun Akhir Renstra	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Kemajuan(%)
			Akhir Renstra	Tahun 2025	
1	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	70,75	106.28	66,56%
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	14,2	22.8	62,28%
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran)	8,51	8.40	101,30%
2	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (%)	80	40	50%
		Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (%)	60	100	166.66%
3	Meningkatnya Gaya Hidup Sehat	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik yg cukup (%)	80	78.9	98.62%
4	Meningkatnya Layanan Kesehatan Baik dan Inklusif	Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif (%)	84,5	79.06	93.56%
		Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%)	100	95	95%
5	Meningkatnya Integrasi Layanan Kesehatan	Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN (%)	100	50.79	50.79%

Berdasarkan tabel 3.1.3.2 dapat diketahui bahwa pada indikator kinerja sasaran Angka Kematian Ibu (AKI) memiliki tingkat kemajuan sebesar 172,18% dari target tahun

akhir renstra 183 per 100.000 kelahiran hidup dan indikator kinerja sasaran Angka Kematian Bayi (AKB) memiliki tingkat kemajuan sebesar 200% dari target tahun akhir renstra 16 per 1000 kelahiran hidup, untuk indikator Prevalensi Penyakit (Insidensi TB) (per 100.000 penduduk) didapatkan capaian sebesar 158% dari target akhir sebesar 201 per 100.000 penduduk, ketiga indikator diatas memiliki tingkat kemajuan kategori tidak tercapai. Sedangkan indikator kinerja sasaran pada Renstra 2025-2029 sebagai berikut:

1. Angka Kematian Ibu (AKI)

   Indikator kinerja sasaran Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2025 memiliki tingkat kemajuan sebesar 66,56% per 100.000 Kelahiran Hidup dari target tahun akhir renstra sebesar 70,75 per 100.000 Kelahiran Hidup. Hal ini berarti bahwa pencapaian pada tahun akhir renstra termasuk pada kriteria tercapai.

2. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)

   Indikator kinerja sasaran Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) tahun 2025 memiliki tingkat kemajuan sebesar 62,28% dari target tahun akhir renstra sebesar 14,2% Hal ini berarti bahwa pencapaian pada tahun akhir renstra termasuk pada kriteria tercapai.

3. Angka Kematian Balita

   Indikator kinerja sasaran Kematian Balita (AKABA) tahun 2025 memiliki tingkat kemajuan sebesar 101,30% per 1.000 Kelahiran Hidup dari target tahun akhir renstra sebesar 8,51 Hal ini berarti bahwa pencapaian pada tahun akhir renstra termasuk pada kriteria tercapai.

4. Angka Populasi Bebas Penyakit Menular

   Indikator kinerja sasaran Populasi Bebas Penyakit Menular dari target tahun akhir memiliki tingkat kemajuan sebesar 50% dari target akhir renstra sebesar 80. Hal ini berarti bahwa pencapaian pada tahun akhir renstra termasuk pada kriteria tidak tercapai.

5. Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular

   Indikator kinerja sasaran Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular dari target tahun akhir memiliki tingkat kemajuan sebesar 166,66% dari target akhir renstra sebesar 60. Hal ini berarti bahwa pencapaian pada tahun akhir renstra termasuk pada kriteria tercapai

6. Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik yg cukup

   Indikator kinerja sasaran Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik yg cukup dari target tahun akhir memiliki tingkat kemajuan sebesar 98,62% dari target akhir renstra sebesar 80. Hal ini berarti bahwa pencapaian pada tahun akhir renstra termasuk pada kriteria tercapai.

7. Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif

   Indikator kinerja sasaran Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif dari target tahun akhir memiliki tingkat kemajuan sebesar 93,56% dari target akhir renstra sebesar 84,5. Hal ini berarti bahwa pencapaian pada tahun akhir renstra termasuk pada kriteria tercapai.

8. Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%)

   Indikator kinerja sasaran Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%) dari target tahun akhir memiliki tingkat kemajuan sebesar 95% dari target renstra sebesar 100. Hal ini berarti bahwa pencapaian pada tahun akhir renstra termasuk pada kriteria tercapai.

9. Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN (%)

   Indikator kinerja sasaran Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN (%) target tahun akhir memiliki tingkat kemajuan sebesar 50,79% dari target akhir renstra sebesar 100. Hal ini berarti bahwa pencapaian pada tahun akhir renstra termasuk pada kriteria tidak tercapai.

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional/ Regional/Provinsi/Kabupaten Lain.

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi tahun 2025 Kabupaten Nganjuk	Realisasi tahun 2025 Kabupaten Ponorogo	Realisasi tahun 2025 Provinsi Jawa Timur
Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	106,28	42,69	94,42
Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	8	8,03	23,60
Prevalensi Penyakit	127	143,36	116

(Insidensi TB) (per 100.000 penduduk)			
Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	106,28	42,69	82,56
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	22,8	7,59	14,7
Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran)	8,40	1,37	82,39
Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (%)	40	-	-
Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (%)	100	-	-
Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik yg cukup (%)	78,9	72,9	65,4
Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif (%)	79,06	61,86	95,83
Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%)	95	98,6	-
Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN (%)	50,79	88	-

Keterangan:

Untuk indikator Angka Populasi Bebas Penyakit Menular dan Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular tidak dapat dibandingkan dengan Kabupaten Ponorogo dan Provinsi Jawa Timur dikarenakan merupakan indikator baru.

A.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja berdasarkan Renstra 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja (%)	Faktor Pendukung/Penghambat	Alternatif Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja (%)	Faktor Pendukung/Penghambat	Alternatif Solusi
1	Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga berdasarkan Siklus	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	183	106,28	172,18%	peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, deteksi dini risiko kehamilan, sistem rujukan yang efektif, serta dukungan masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan program kesehatan ibu dan anak	
		Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	16	8	200.00%	peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi, ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, sistem rujukan yang efektif, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan bayi.	
		Prevalensi Penyakit (Insidensi TB) (per 100.000 penduduk)	201	127	158,26%	Upaya dari Puskesmas dan jaringanya dalam melakukan skrenning Tuberkulosis (TB) untuk meningkatkan cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (TB) sudah berjalan secara optimal	

Tabel 3.1.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja (%)	Faktor Pendukung/Penghambat	Alternatif Solusi
1	Meningkatnya	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per	94,34	106,28	88,76%	pelayanan kesehatan ibu, deteksi dini risiko	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja (%)	Faktor Pendukung/Penghambat	Alternatif Solusi
	Kesehatan Ibu dan Anak	100.000 kelahiran hidup))				kehamilan, sistem rujukan yang efektif, serta dukungan masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan program kesehatan ibu dan anak	
	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	18,8	22,8	82,45%	pelayanan kesehatan ibu dan balita, serta dukungan masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan program kesehatan ibu dan anak	
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran)	9,67	8,40	115,11%	peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi yang baik, imunisasi lengkap, lingkungan yang sehat, serta peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam mendukung program kesehatan anak	
	Meningkatnya Gaya Hidup Sehat	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (%)	40	40	100%	sudah optimalnya sistem surveilans dan pengendalian penyakit serta capaian penemuan ODHIV dan pengobatan, selain itu juga angka keberhasilan pengobatan TBC juga sudah >90%	
	Meningkatnya Layanan Kesehatan Baik	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (%)	30	100	333%	penerapan pola hidup sehat, deteksi dini faktor risiko PTM, peningkatan akses pelayanan kesehatan,	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja (%)	Faktor Pendukung/Penghambat	Alternatif Solusi
	dan Inklusif					serta dukungan program pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan.	
	Meningkatnya Integrasi Layanan Kesehatan	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik yg cukup (%)	65	78,9	121,38%	peningkatan kesadaran masyarakat, ketersediaan fasilitas olahraga, dukungan program pemerintah, serta lingkungan sosial yang mendukung pola hidup aktif dan sehat	
		Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif (%)	95	95	100%	program JKN yang kuat, dukungan pembiayaan pemerintah bagi masyarakat kurang mampu, kemudahan akses layanan, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan.	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%)	80	79,06	98,82%	komitmen pemerintah daerah, kesiapan manajemen fasilitas kesehatan, kompetensi tenaga kesehatan, ketersediaan sarana prasarana, serta pelaksanaan standar mutu pelayanan kesehatan secara berkelanjutan	
		Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN (%)	28,99	50,79	175,19%	ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, kompetensi SDM, dukungan kebijakan pemerintah,	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja (%)	Faktor Pendukung/Penghambat	Alternatif Solusi
						serta komitmen fasilitas kesehatan dalam pengelolaan dan pelaporan data kesehatan secara terintegrasi.	

Hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk antara lain:

- PMK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah
- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Nganjuk
- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2024 tentang pembebasan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas bagi peserta BPJS aktif
- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2024 tentang tata cara pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas
- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2024 yang mengubah Perbup Nomor 19 Tahun 2021 terkait pedoman pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk untuk memfasilitasi penganggaran BPJS
- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
- Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/872/K/411.013/2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Nganjuk
- Perangkat Daerah melaksanakan peningkatan kualitas layanan kesehatan dan penerapan Universal Health Coverage (UHC) untuk memastikan akses kesehatan merata.

- Perangkat Daerah melaksanakan program pemeriksaan kesehatan gratis/PKG.
- Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, serta dukungan manajemen terhadap penerapan 5 pilar DM (edukasi, nutrisi, latihan fisik, farmakologi, pemantauan gula darah).
- Adanya program jemput bola atau kunjungan rumah (home visit) oleh petugas kesehatan

A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.1.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga berdasarkan Siklus Hidup	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	172,18%	42,25%	129,93%
		Angka Kematian Bayi (AKB) ((per 1000 kelahiran hidup))	200%	42,25%	157,75%
		Prevalensi Penyakit (Insidensi TB) ((per 100.000 penduduk))	158,26%	42,25%	116,01%
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	88,76%	91,95%	-3,19%
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	82,45%	91,95%	-9,5%
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran)	115,11%	91,95%	23,16%
		Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (%)	100%	91,95%	8,05%
		Angka Populasi Bebas Penyakit	333%	91,95%	241,05%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
		Tidak Menular (%)			
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik yg cukup (%)	121,38%	91,95%	29,43%
		Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif (%)	98,82%	91,95%	6,87%
		Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%)	100%	91,95%	8,05%
		Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN (%)	175,19%	91,95%	83,24%

A.7 Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan berdasarkan Renstra 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Derajat Kesehatan Keluarga		Indeks Kesehatan Keluarga					
	Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga berdasarkan Siklus Hidup	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	65	60.50	93.08%
		Prevalensi Penyakit (Insidensi TB) (Per 100.000 penduduk)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)	1	-	0.00%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	100.00%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	-	0.00%
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	16	13	81.25%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	9	75.00%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
				(Dokumen)			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang /bulan)	2302	-	0.00%
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	1	-	0.00%
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	3	75.00%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dokumen)	30	23	76.67%
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	100	100.00%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dokumen)	288	188	65.28%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	22	20	90.91%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	22	-	0.00%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	10	83.33%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	8	66.67%
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	110	63	57.27%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	55	44	80.00%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	55	43	78.18%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Unit)	34	-	0.00%
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	-	0.00%
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	-	0.00%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	36	27	75.00%
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	9	75.00%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12	9	75.00%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
				Disediakan (Laporan)			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	9	75.00%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara (Unit)	91	70	76.92%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	11	8	72.73%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	57	45	78.95%
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	22	17	77.27%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	-	0.00%
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
				Prosentase Fasyankes terakreditasi (persen)	70	100	142.86%
				Prosentase penduduk terdaftar jaminan kesehatan nasional (persen)	80	98.03	122.54%
				Prosentase SPM yang memenuhi target (persen)	40	97,35	243.38%
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Fasyankes terakreditasi (persen)	70	95	135.71%
			Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	1	-	0.00%
			Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1	-	0.00%
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	20	-	0.00%
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	11	-	0.00%
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	14	-	0.00%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	438	-	0.00%
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	32	7	21.88%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	1200	-	0.00%
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	1	1	100.00%
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penduduk terdaftar jaminan kesehatan nasional (persen)	80	-	0.00%
				Prosentase SPM yang memenuhi target (persen)	40	-	0.00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	12016	7,283	60.61%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	12572	7,804	62.07%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	12334	7,460	60.48%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	56186	37,058	65.96%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	124488	111,369	89.46%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	720687	356,126	49.41%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	197834	97,265	49.16%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	407300	56,597	13.90%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	22718	20,773	91.44%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
				Sesuai Standar (Orang)			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	2163	1,958	90.52%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	10594	7,244	68.38%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	20090	16,648	82.87%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	5	4	80.00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	2	1	50.00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	7	7	100.00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	4	3	75.00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4	3	75.00%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
				(Dokumen)			
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	4	2	50.00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	3	2	66.67%
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) Dokumen)	20	16	80.00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	226278	6,280	2.78%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	43	41	95.35%
			Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	2	1	50.00%
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	24	18	75.00%
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12	9	#VALUE!

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	20	15	75.00%
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1	3	300.00%
			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	24	-	0.00%
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	120	90	75.00%
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	55	49	89.09%
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	12	9	75.00%
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	48	36	75.00%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1	-	0.00%
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	2180	1,156	53.03%
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	316	255	80.70%
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	8	12	150.00%
			Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	1036	7	0.68%
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	4	2	50.00%
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Prosentase SPM yang memenuhi target (%)	7	6	85.71%
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	7	6	85.71%
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat	Prosentase Fasyankes terakreditasi (Persen)	70	-	0.00%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
			Daerah Kabupaten/Kota				
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	55	55	100.00%
			Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	4	2	50.00%
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
				Prosentase tenakes yang memenuhi standar	100	100	100.00%
			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Surat Ijin Praktik tenaga kesehatan (Dokumen)	1200	900	75.00%
			Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1200	900	75.00%
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil perencanaanpembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan (Dokumen)	8	6	75.00%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
			Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	4	3	75.00%
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	4	3	75.00%
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (orang)	250	-	0.00%
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	250	-	0.00%
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
				Prosentase sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman yang dinyatakan laik konsumsi	100	100	100.00%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Prosentase Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Persen)	100	-	0.00%
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	68	55	80.88%
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Prosentase Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Persen)	54	43	79.63%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	54	43	79.63%
			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	8	3	37.50%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	2	3	150.00%
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi MakananMinuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	54	-	0.00%
			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	54	43	79.63%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
				Indeks Keluarga Sehat	0,8	0,2	25.00%
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	4	2	50.00%
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	3	2	66.67%
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase keluarga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (Persen)	55	-	0.00%
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokum)en	4	2	50.00%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat (Keluarga)	72140	-	0.00%
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	4	2	50.00%
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	4	2	50.00%

Tabel 3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan berdasarkan Renstra 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))					
	1. Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	1. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		2. Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerahh	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	65	60.50	93.08%
		3. Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)	1	1	100.00%
	2. Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (%)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	100.00%
		2. Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (%)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	100.00%
	3. Meningkatnya Gaya Hidup Sehat	1. Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik yg cukup (%)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	16	16	100.00%
	4. Meningkatnya Layanan Kesehatan Baik dan Inklusif	1. Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi Paripurna (%)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	12	100.00%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
		2. Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif (%)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang /bulan)	2302	2166	94.09%
	5. Meningkatnya Integrasi Layanan Kesehatan	1. Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN (%)	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	100.00%
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	100.00%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dokumen)	30	28	93.33%
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	100	100.00%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dokumen)	288	288	100.00%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	22	22	100.00%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	22	22	100.00%
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12	100.00%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	100.00%
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	110	110	100.00%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	55	55	100.00%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	55	55	100.00%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Unit)	34	39	114.71%
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	24	600.00%
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	15	100.00%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	36	36	100.00%
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	100.00%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	100.00%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12	12	100.00%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
				Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara (Unit)	91	91	100.00%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	11	11	100.00%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	57	57	100.00%
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	22	22	100.00%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	100.00%
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
			Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu	Cakupan kunjungan nifas (KF) lengkap sesuai standar (%)	26.8	60.23	224.74%
				Persentase anemia pada ibu hamil (%)	27.7	7.18	25.92%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
				Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia (%)	20	3.67	18.35%
				Presentase kabupaten kota dengan CFR direct obstetric (eklampsi dan perdarahan post partum <1%) (%)	20	0.80	4.00%
			Meningkatnya Pelayanan Gizi masyarakat	Insiden Stunting pada Balita (%)	23	6.28	27.30%
				Persentase anak usia 6 23 Bulan mendapatkan MPASI (%)	60.9	91.84	150.80%
				Persentase Bayi 6 Bulan mendapatkan ASI eksklusif (%)	68.6	46.83	68.27%
				Presentase Bumil KEK (%)	15	12.59	83.93%
				Prevalensi wasting pada balita (%)	8	4.62	57.75%
			Meningkatnya air minum aman, Meningkatnya kualitas SKUDR Permukiman, Meningkatnya pemberdayaan kesehatan berbasis masyarakat	Desa ber-STBM Lima Pilar (%)	18	23.94	133.00%
				Jumlah Permukiman yang memenuhi syarat (Satuan Permukiman (SP))	50	-	0.00%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
				Persentase Sarana Air Minum yang memenuhi syarat (%)	5	30.00	600.00%
			Terpenuhinya perbekalan kesehatan sesuai standar difasyankes	Persentase faskes primer dengan Obat, Vaksin dan BMHP sesuai standar (%	85	100.00	117.65%
			Meningkatnya tingkatan kabupaten sehat	Tingkatan Kabupaten Sehat (Predikat)	Padapa	Padapa	Padapa
			Meningkatnya upaya kesehatan jiwa	Prevalensi depresi pada usia lebih dari sama dengan 15 Tahun (%)	1,4	7,98	570.00%
			Meningkatnya deteksi dini faktor resiko penyakit, Menurunnya risiko penyakit degeneratif	Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis pada semua kelompok umur (%)	25	41,19	164.76%
				Prevalensi Obesitas >18 Tahun (%)	23.4	32.70	139.74%
			Meningkatnya angka populasi bebas penyakit tidak menular	Presentase DM dalam pengendalian (%)	90	85	94.44%
				Presentase hipertensi dalam pengendalian (%)	85	76	89.41%
				Presentase Puskesmas melaksanakan upaya berhenti merokok (%)	100	100	100.00%
			Meningkatnya kekebalan kelompok, Menurunnya kasus keracunan pangan	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	70,84	88,55%
				Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target (%)	74	66,68	90.11%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
				Jumlah kasus keracunan pangan (Kasus)	kurang dari sama dengan 2	3	157,89%
			Meningkatnya mutu layanan primer dan labkesmas tk-2, Meningkatnya kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	IKM Layanan Kesehatan RSUD, Puskesmas, dan Labkesmas Tk-2) (Nilai)	60	89,5	149.17%
				Persentase Labkesmas Tk 2 yang mencapai target INM (%)	100	100	100.00%
				Persentase Puskesmas yang mencapai target INM (%)	10	100	1000.00%
			Meningkatnya perlindungan kesehatan	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	96	98.03	102.11%
			Meningkatnya fasyankes yang sudah terdaftar di SIKN dengan status memiliki RME	Prosentase fasyankes sudah terdaftar di SIKN dengan status memiliki RME (%)	28.99	50.79	175.20%
			Meningkatnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan (Dinas Kesehatan)	Persentase Labkesmas Tk 2 dengan SPA sesuai standar (%)	70	76.00	108.57%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
				Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar (%)	40	95	237.50%
				Persentase RS Pemda dengan SPA Sesuai Standar (%)	45	76.06	169.02%
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada anak	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	16.85	7.63	45.28%
				Angka Kematian Neonatal (per 1000 kelahiran hidup)	9.3	5.99	64.41%
			Meningkatnya angka populasi bebas penyakit menular	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	90	91	101.11%
				Annual parasite insdence malaria per 1000 penduduk (Per 1000 Penduduk)	<1	0,0	0,00%
				Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	90	57	63.33%
				Insidensi HIV per 1000 penduduk (Per 1000 Penduduk)	0.24	0.27	112.50%
				Insidensi TBC per 100000 penduduk (Angka)	252	127	50.40%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
				Presentase kematian akibat dengue (%)	2	0.7	35.00%
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Fasyankes terakreditasi (persen)	70	95	135.71%
			Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	1	0	0.00%
			Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1	1	100.00%
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	20	20	100.00%
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	11	11	100.00%
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	14	11	78.57%
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	438	414	94.52%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	32	32	100.00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	1200	0	0.00%
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	1	1	100.00%
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penduduk terdaftar jaminan kesehatan nasional (persen)	80	98.03	122.54%
				Prosentase SPM yang memenuhi target (persen)	40		0.00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	12016	9631	80.15%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	12572	10227	81.35%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	12334	9883	80.13%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	56186	49384	87.89%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	124488	111369	89.46%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	720687	356248	49.43%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	197834	97265	49.16%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	407300	63493	15.59%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	22718	24429	107.53%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	2163	2193	101.39%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	10594	10255	96.80%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	20090	20568	102.38%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	5	5	100.00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	2	2	100.00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	7	7	100.00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	4	4	100.00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	4	4	100.00%
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	4	4	100.00%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	3	3	100.00%
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) Dokumen)	20	20	100.00%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	226278	7429	3.28%
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	43	52	120.93%
			Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	2	2	100.00%
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	24	24	100.00%
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12	12	100.00%
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	20	20	100.00%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1	4	400.00%
			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	24	24	100.00%
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	120	120	100.00%
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	55	55	100.00%
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	12	12	100.00%
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	48	48	100.00%
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1	1	100.00%
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2180	1451	66.56%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
				(Orang)			
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	316	311	98.42%
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	8	12	150.00%
			Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	1036	7	0.68%
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	4	4	100.00%
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Prosentase SPM yang memenuhi target (%)	7	7	100.00%
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	7	7	100.00%
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Fasyankes terakreditasi (Persen)	70	100	142.86%
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	55	55	100.00%
			Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	4	4	100.00%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
				(Dokumen)			
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
			Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Rasio nakes dan named sesuai populasi (Rasio)	5,3:1000	3,6:1000	67,92%
			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Surat Ijin Praktik tenaga kesehatan (Dokumen)	1200	1200	100.00%
			Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1200	1299	100.00%
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil perencanaanpembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan (Dokumen)	8	8	100.00%
			Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	4	4	100.00%
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	4	4	100.00%
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang	250	0	0.00%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
			Kabupaten/Kota	Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (orang)			
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	250	217	86.80%
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
			Tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)	100	100	100.00%
			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Prosentase Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Persen)	100	0	0.00%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	68	68	100.00%
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Prosentase Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Persen)	54	54	100.00%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	54	54	100.00%
			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	8	4	50.00%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	2	4	200.00%
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi MakananMinuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	54	0	0.00%
			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	54	54	100.00%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
			Meningkatnya upaya gaya hidup sehat pada masyarakat	Persentase Pustu dan Puskesmas yang menyelenggarakan program aktifitas fisik (%)	50	100	200.00%
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	4	4	100.00%
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	3	4	133.33%
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase keluarga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (Persen)	55		0.00%
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokum)en	4	4	100.00%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indkator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Capaian
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat (Keluarga)	72140	72140	100.00%
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	4	4	100.00%
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	4	4	100.00%

Analisis capaian kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025 dilihat dari indikator Program sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota

   Realisasi Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota tahun 2025 realisasi nilai Sakip 60.50 dari target nilai Sakip 65.00 dengan capaiannya 93.08%. Adapun kegiatan yang mendukung penilaian SAKIP yang sudah berproses diawal tahun sebagai berikut:

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan indikator sebagai berikut :

   a. Cakupan kunjungan nifas (KF) lengkap sesuai standar

      Realisasi kunjungan nifas (KF) lengkap sesuai standar adalah 60.23% dari target 26.8% sehingga capaiannya 224.73%.

   b. Persentase anemia pada ibu hamil

      Realisasi anemia pada ibu hamil adalah 7.18% dari target 27.7% sehingga capaiannya 25.92%

   c. Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia

      Realisasi ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia adalah 3.67% dari target 20% sehingga capaiannya 18.35%

   d. Presentase kabupaten kota dengan CFR direct obstetric (eklampsi dan perdarahan post partum <1%

      Realisasi kabupaten kota dengan CFR direct obstetric (eklampsi dan perdarahan post partum <1% dari target 20% sehingga capaiannya 4%

   e. Insiden Stunting pada Balita

      Realisasi Insiden stunting pada balita adalah 6.28% dar target 23 % sehingga capaiannya 27.30%

f. Persentase anak usia 6-23 Bulan mendapatkan 23 Bulan mendapatkan MPASI

Realisasi anak usia 6-23 Bulan mendapatkan 23 Bulan mendapatkan MPASI adalah 91.84% dari target 609% sehingga capaiannya 100.50%

g. Persentase Bayi 6 Bulan mendapatkan ASI eksklusif

Realisasi Bayi 6 Bulan mendapatkan ASI eksklusif adalah 46.83 % dari target 68.6% sehingga capaiannya 68.27%

h. Presentase Bumil KEK

Realisasi Bumil KEK adalah 12.59% dari target 15% sehingga capaiannya 83.93%

i. Prevalensi wasting pada balita

Realisasi wasting pada balita adalah 4.62% dari target 8% sehingga capaiannya 57.75%

j. Desa ber-STBM Lima Pilar

Realisasi Desa ber-STBM Lima Pilar adalah 23.94% dari target 18% sehingga capaiannya 100.33%

k. Jumlah Permukiman yang memenuhi syarat

Realisasi Permukiman yang memenuhi syarat adalah 0 Permukiman dari target 50 Permukiman sehingga capaiannya 0 Permukiman

l. Persentase Sarana Air Minum yang memenuhi syarat

Realisasi Sarana Air Minum yang memenuhi syarat adalah 30.00 % dari target 5% sehingga capaiannya 600.00%

m. Persentase faskes primer dengan Obat, Vaksin dan BMHP sesuai standar

Realisasi faskes primer dengan Obat, Vaksin dan BMHP sesuai standar adalah 100.00% dari target 85% sehingga capaiannya 100.18%

n. Tingkatan Kabupaten Sehat

Predikat Kabupaten sehat tahun 2025 adalah Padapa

o. Prevalensi depresi pada usia lebih dari sama dengan 15 Tahun

Realisasi depresi pada usia lebih dari sama dengan 15 Tahun adalah 7.98% dari target 1.4% sehingga capaiannya 570%

p. Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis pada semua kelompok umur

Realisasi pemeriksaan kesehatan gratis pada semua kelompok umur adalah 41.19% dari target 25% sehingga capaiannya 164.76%

q. Prevalensi Obesitas >18 Tahun

Realisasi Prevalensi Obesitas >18 Tahun adalah 32.70% dari target 23.4% sehingga capaiannya 100.40%

r. Presentase DM dalam pengendalian

Realisasi DM dalam pengendalian adalah 85% dari target 90% sehingga capaiannya 94.00%

s. Presentase hipertensi dalam pengendalian

Realisasi hipertensi dalam pengendalian adalah 76.00% dari target 85% sehingga capaiannya 89.00%

t. Presentase Puskesmas melaksanakan upaya berhenti merokok

Realisasi Puskesmas melaksanakan upaya berhenti merokok adalah 100% dari target 100% sehingga capaiannya 100%

u. Cakupan imunisasi bayi lengkap

Realisasi imunisasi bayi lengkap adalah 70.84% dari target 80% sehingga capaiannya 88.55%

v. Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target

Realisasi imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target adalah 66.68% dari target 74% sehingga capaiannya 90.11%

w. Jumlah kasus keracunan pangan

Realisasi kasus keracunan pangan adalah 3 kasus dari target ≤2 kasus sehingga capaiannya 157.89%

x. IKM Layanan Kesehatan RSUD, Puskesmas, dan Labkesmas Tk-2

Realisasi IKM Layanan Kesehatan RSUD, Puskesmas, dan Labkesmas Tk-2 adalah 80% dari target 60% sehingga 133.33%

y. Persentase Labkesmas Tk 2 yang mencapai target INM

Realisasi Labkesmas Tk 2 yang mencapai target INM adalah 100% dari target 100% sehingga capaiannya 100%

z. Persentase Puskesmas yang mencapai target INM

Realisasi Puskesmas yang mencapai target INM adalah100% dari target 10% sehingga capaiannya 1000%

aa. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)

Realisasi kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) adalah 98.03% dari target 96% sehingga capaiannya 100.02%

bb. Prosentase fasyankes sudah terdaftar di SIKN dengan status memiliki RME

Realisasi fasyankes sudah terdaftar di SIKN dengan status memiliki RME adalah 50.79% sehingga capaiannya 100.75%

cc. Persentase Labkesmas Tk 2 dengan SPA sesuai standar

Realisasi Labkesmas Tk 2 dengan SPA sesuai standar adalah 76% dari target 70% sehingga capaiannya 100.85%

dd. Persentase Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar

Realisasi Puskesmas dengan SPA Sesuai Standar adalah 95% dari target 40% sehingga capaiannya 237.50%

ee. Persentase RS Pemda dengan SPA Sesuai Standar

Realisasi RS Pemda dengan SPA Sesuai Standar adalah 76.06% dari target 45% sehingga capaiannya 100.69%

ff. Angka Kematian Bayi (AKB)

Realisasi Angka Kematian Bayi (AKB) adalah 7.63 per 1.000 kelahiran hidup dari target 16.85 per 1.000 kelahiran hidup sehingga capaiannya 45.28%

gg. Angka Kematian Neonatal

Realisasi Angka Kematian Neonatal adalah 5.99 per 1.00 kelahiran hidup daro target 9.3 per 1.000 kelahiran hidup sehingga capaiannya 64.40%

hh. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)

ii. Realisasi Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) Adalah 91.00% dari target 90% sehingga capainnya 100.01 %

jj. Annual parasite insdence malaria malaria

Realisasi Annual parasite insdence malaria malaria adalah 0 per 1.000 penduduk dari target <1per 1.000 penduduk sehingga capaiannya 0.00%

kk. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)

Realisasi penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) adalah 57.00% dari target 90% sehingga capaiannya 63.33%

ll. Insidensi HIV per 1000 penduduk

Realisasi Insidensi HIV per 1000 penduduk adalah 0.27 per 1000 penduduk dari target 0.24 per 1000 penduduk sehingga capaiannya 100.13%

mm. Insidensi TBC per 100000 penduduk

Realisasi Insidensi TBC per 100000 penduduk adalah 127 dari target 252 sehingga capaiannya 50.39%

nn. Presentase kematian akibat dengue

Realisasi kematian akibat dengue adalah 0.7% dari target 2% sehingga capaiannya 35.00%

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan

   Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dengan indikator kinerja Rasio nakes dan named sesuai populasi (Rasio) adalah perbandingan jumlah tenaga kesehatan (Nakes) dan tenaga medis (Named) terhadap jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu. Realisasi Rasio nakes dan named sesuai populasi (Rasio) adalah 3.6:1000 rasio dari target 5.3:1000 rasio sehingga capaiannya 67.92%

4. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman

   Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dengan indikator kinerja Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar. Dimana fasyankes tersebut adalah Puskesmas dan RS Pemerintah yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar mencakup :

   1. Pengelolaan sediaan farmasi,memiliki SOP kecuali SOP pendistribusian
   2. Pelayanan farmasi klinis: pengkajian resep, penyerahan obat, pemberian informasi obat, PIO, dan konseling

   Dari 20 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit Pemerintah telah melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar. Realisasi fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar adalah 100% dari target 100% sehingga capaiannya 100%

5. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

   Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan indikator kinerja Persentase Pustu dan Puskesmas yang menyelenggarakan program aktifitas fisik adalah Pustu dan puskesmas melaksanakan kegiatan peningkatan aktivitas fisik (senam/olahraga bersama, skrinning kebugaran kelompok olah raga). Realisasi Pustu dan Puskesmas yang menyelenggarakan program aktifitas fisik adalah 100 % dari target 50% sehingga capaiannya 200.00%.

B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Penyerapan
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**465.476.878.503,23**	**430.591.274.986,30**	**34.885.603.516,93**	**92,51%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**39.658.550,00**	**21.708.600,00**	**17.949.950,00**	**54,74%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**9.341.350,00**	**4.837.500,00**	**4.503.850,00**	**51,79%**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**19.534.200,00**	**9.539.300,00**	**9.994.900,00**	**48,83%**
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**10.783.000,00**	**7.331.800,00**	**3.451.200,00**	**67,99%**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**159.687.589.000,00**	**146.041.809.683,00**	**13.645.779.317,00**	**91,45%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**159.687.589.000,00**	**146.041.809.683,00**	**13.645.779.317,00**	**91,45%**
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**139.357.000,00**	**101.971.700,00**	**37.385.300,00**	**73,17%**
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	**139.357.000,00**	**101.971.700,00**	**37.385.300,00**	**73,17%**
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**45.897.250,00**	**10.635.500,00**	**35.261.750,00**	**23,17%**
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	**45.897.250,00**	**10.635.500,00**	**35.261.750,00**	**23,17%**
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**835.201.750,00**	**668.286.902,00**	**166.914.848,00**	**80,02%**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**30.000.000,00**	**29.253.040,00**	**746.960,00**	**97,51%**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**213.548.850,00**	**179.265.000,00**	**34.283.850,00**	**83,95%**
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**50.000.000,00**	**23.531.000,00**	**26.469.000,00**	**47,06%**
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**258.604.900,00**	**232.871.690,00**	**25.733.210,00**	**90,05%**
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**61.100.000,00**	**33.772.750,00**	**27.327.250,00**	**55,27%**
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	**6.500.000,00**	**4.560.000,00**	**1.940.000,00**	**70,15%**
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**215.448.000,00**	**165.033.422,00**	**50.414.578,00**	**76,60%**

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**279.950.000,00**	**244.939.200,00**	**35.010.800,00**	**87,49%**
Pengadaan Mebel	**44.950.000,00**	**39.094.200,00**	**5.855.800,00**	**86,97%**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**235.000.000,00**	**205.845.000,00**	**29.155.000,00**	**87,59%**
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.137.761.240,00**	**1.020.436.343,00**	**117.324.897,00**	**89,69%**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**5.000.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**50,00%**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**500.001.300,00**	**459.988.959,00**	**40.012.341,00**	**92,00%**
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**632.759.940,00**	**557.947.384,00**	**74.812.556,00**	**88,18%**
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.265.672.800,00**	**940.286.559,00**	**325.386.241,00**	**74,29%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**25.000.000,00**	**17.042.900,00**	**7.957.100,00**	**68,17%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**624.993.800,00**	**338.829.493,00**	**286.164.307,00**	**54,21%**
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**50.000.000,00**	**35.480.000,00**	**14.520.000,00**	**70,96%**
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**565.679.000,00**	**548.934.166,00**	**16.744.834,00**	**97,04%**
Peningkatan Pelayanan BLUD	**302.045.790.913,23**	**281.541.200.499,30**	**20.504.590.413,93**	**93,21%**
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	**302.045.790.913,23**	**281.541.200.499,30**	**20.504.590.413,93**	**93,21%**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**184.211.544.253,76**	**168.784.522.212,70**	**15.427.022.041,06**	**91,63%**
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**50.446.549.192,00**	**43.693.089.564,00**	**6.753.459.628,00**	**86,61%**
Pembangunan Puskesmas	**250.000.000,00**	**18.455.000,00**	**231.545.000,00**	**7,38%**
Pengembangan Puskesmas	**7.032.355.500,00**	**6.569.039.000,00**	**463.316.500,00**	**93,41%**
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	**4.220.200.000,00**	**4.136.966.831,00**	**83.233.169,00**	**98,03%**
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	**1.311.338.350,00**	**791.874.000,00**	**519.464.350,00**	**60,39%**
Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	**19.853.395.500,00**	**18.908.128.471,00**	**945.267.029,00**	**95,24%**
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	**509.781.000,00**	**173.510.876,00**	**336.270.124,00**	**34,04%**

Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	**17.244.178.842,00**	**13.074.793.886,00**	**4.169.384.956,00**	**75,82%**
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	**17.800.000,00**	**12.821.500,00**	**4.978.500,00**	**72,03%**
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**100,00%**
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**132.314.135.061,76**	**124.242.293.583,70**	**8.071.841.478,06**	**93,90%**
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	**1.792.195.000**	**1.557.830.490**	**234.364.510,00**	**86,92%**
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	**503.540.000,00**	**419.710.150,00**	**83.829.850,00**	**83,35%**
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	**100.000.000,00**	**77.512.680,00**	**22.487.320,00**	**77,51%**
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	**100.000.000,00**	**77.728.750,00**	**22.271.250,00**	**77,73%**
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	**652.800.000,00**	**534.092.250,00**	**118.707.750,00**	**81,82%**
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	**31.698.000,00**	**17.306.800,00**	**14.391.200,00**	**54,60%**
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	**763.480.000,00**	**553.456.632,00**	**210.023.368,00**	**72,49%**
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	**150.000.000,00**	**123.602.500,00**	**26.397.500,00**	**82,40%**
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	**21.510.000,00**	**15.381.000,00**	**6.129.000,00**	**71,51%**
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	**305.200.000,00**	**275.310.250,00**	**29.889.750,00**	**90,21%**
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	**255.900.000,00**	**184.911.300,00**	**70.988.700,00**	**72,26%**
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	**550.000.000,00**	**543.268.760,00**	**6.731.240,00**	**98,78%**
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk PADA KONDISI Kejadian Luar Biasa (KLB)	**14.237.000,00**	**12.730.850,00**	**1.506.150,00**	**89,42%**
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	**6.719.000,00**	**5.229.000,00**	**1.490.000,00**	**77,82%**
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	**3.650.024.638,00**	**3.403.962.891,00**	**246.061.747,00**	**93,26%**
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	**253.300.000,00**	**201.582.050,00**	**51.717.950,00**	**79,58%**
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	**529.800.000,00**	**448.118.500,00**	**81.681.500,00**	**84,58%**
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	**190.332.000,00**	**171.155.200,00**	**19.176.800,00**	**89,92%**

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	**79.100.000,00**	**57.626.400,00**	**21.473.600,00**	**72,85%**
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	**529.150.000,00**	**387.881.861,00**	**141.268.139,00**	**73,30%**
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	**46.515.000,00**	**30.812.000,00**	**15.703.000,00**	**66,24%**
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	**7.365.000,00**	**4.515.000,00**	**2.850.000,00**	**61,30%**
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	**19.774.700,00**	**10.402.800,00**	**9.371.900,00**	**52,61%**
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	**2.925.500.750,00**	**2.284.732.437,00**	**640.768.313,00**	**78,10%**
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dinkes	**99.406.023.743,76**	**98.622.077.012,00**	**783.946.731,76**	**99,21%**
Pengambilan dan pengiriman spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	**60.412.500,00**	**28.485.900,00**	**31.926.600,00**	**47,15%**
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	**300.000.000,00**	**244.019.362,00**	**55.980.638,00**	**81,34%**
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	**7.031.700,00**	**6.490.500,00**	**541.200,00**	**92,30%**
Operasional Pelayanan Puskesmas	**15.636.687.980,00**	**11.715.945.910,70**	**3.920.742.069,30**	**74,93%**
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	**1.036.854.000,00**	**811.908.858,00**	**224.945.142,00**	**78,31%**
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	**23.973.400,00**	**16.440.900,00**	**7.532.500,00**	**68,58%**
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	**265.100.000,00**	**223.231.730,00**	**41.868.270,00**	**84,21%**
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	**9.189.500,00**	**8.970.650,00**	**218.850,00**	**97,62%**
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	**250.000.000,00**	**203.271.060,00**	**46.728.940,00**	**81,31%**
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	**110.000.000,00**	**94.907.000,00**	**15.093.000,00**	**86,28%**
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	**110.000.000,00**	**82.691.350,00**	**27.308.650,00**	**75,17%**
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	**9.131.150,00**	**7.362.900,00**	**1.768.250,00**	**80,63%**
Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	**7.638.000,00**	**5.719.500,00**	**1.918.500,00**	**74,88%**
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	**97.925.000,00**	**79.415.350,00**	**18.509.650,00**	**81,10%**

Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	**748.377.000,00**	**184.820.050,00**	**563.556.950,00**	**24,70%**
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	**108.150.000,00**	**84.075.000,00**	**24.075.000,00**	**77,74%**
Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	**649.500.000,00**	**423.600.000,00**	**225.900.000,00**	**65,22%**
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	**383.860.000,00**	**179.470.915,00**	**204.389.085,00**	**46,75%**
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	**383.860.000,00**	**179.470.915,00**	**204.389.085,00**	**46,75%**
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**1.067.000.000,00**	**669.668.150,00**	**397.331.850,00**	**62,76%**
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	**707.000.000,00**	**433.877.357,00**	**273.122.643,00**	**61,37%**
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	**360.000.000,00**	**235.790.793,00**	**124.209.207,00**	**65,50%**
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**1.577.402.200,00**	**1.365.382.850,00**	**212.019.350,00**	**86,56%**
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	**8.568.600,00**	**8.568.400,00**	**200,00**	**100,00%**
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	**8.568.600,00**	**8.568.400,00**	**200,00**	**100,00%**
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**67.650.600,00**	**53.397.950,00**	**14.252.650,00**	**78,93%**
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	**10.735.400,00**	**10.686.200,00**	**49.200,00**	**99,54%**
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	**56.915.200,00**	**42.711.750,00**	**14.203.450,00**	**75,04%**
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**1.501.183.000,00**	**1.303.416.500,00**	**197.766.500,00**	**86,83%**
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**1.501.183.000,00**	**1.303.416.500,00**	**197.766.500,00**	**86,83%**
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**1.266.156.500,00**	**953.987.638,00**	**312.168.862,00**	**75,35%**
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**345.000.000,00**	**285.221.150,00**	**59.778.850,00**	**82,67%**
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**345.000.000,00**	**285.221.150,00**	**59.778.850,00**	**82,67%**

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**628.092.000,00**	**460.638.938,00**	**167.453.062,00**	**73,34%**
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**628.092.000,00**	**460.638.938,00**	**167.453.062,00**	**73,34%**
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	**48.442.500,00**	**24.116.250,00**	**24.326.250,00**	**49,78%**
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik	**48.442.500,00**	**24.116.250,00**	**24.326.250,00**	**49,78%**
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**244.622.000,00**	**184.011.300,00**	**60.610.700,00**	**75,22%**
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	**244.622.000,00**	**184.011.300,00**	**60.610.700,00**	**75,22%**
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**2.450.204.674,00**	**2.056.678.155,00**	**393.526.519,00**	**83,94%**
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**896.098.674,00**	**686.097.959,00**	**210.000.715,00**	**76,57%**
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	**896.098.674,00**	**686.097.959,00**	**210.000.715,00**	**76,57%**
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**444.300.000,00**	**397.680.950,00**	**46.619.050,00**	**89,51%**
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	**427.650.000,00**	**381.038.450,00**	**46.611.550,00**	**89,10%**
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	**16.650.000,00**	**16.642.500,00**	**7.500,00**	**99,95%**
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**1.109.806.000,00**	**972.899.246,00**	**136.906.754,00**	**87,66%**
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	**1.109.806.000,00**	**972.899.246,00**	**136.906.754,00**	**87,66%**
TOTAL	**654.982.186.130,99**	**603.751.845.842,00**	**51.230.340.288,99**	**92,18%**

Berdasarkan tabel 3.7 dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Realisasi anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota adalah Rp. 430.591.274.986,30 dari target Rp. 465.476.878.503,23 sehingga capaiannya 92,51%
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   Realisasi anggaran program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat adalah Rp. 168.784.522.212,70 dari target Rp. 184.211.544.253,76 sehingga capaiannya 91,63%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
   Realisasi program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan adalah Rp. 1.365.382.850,00 dari target Rp. 1.577.402.200,00 sehingga capaiannya 86,56%
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
   Realisasi program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman adalah Rp. 953.987.638,00 dari target Rp. 1.266.156.500,00 sehingga capaiannya 75,35%
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
   Realisasi program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan adalah Rp. 2.056.678.155,00 dari target Rp. 2.450.204.674,00 sehingga capaiannya 83,94%

Secara keseluruhan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah Rp. 603.751.845.842,00 atau sebesar 92,18% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 654.982.186.130,99 sehingga dapat dinilai penyerapan anggaran sangat tinggi. Hal ini berarti telah terjadi efsiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 56.884.016.094,94 atau sebesar 8,84%.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien. Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk pada tahun anggaran 2025 merupakan tahun ke-1 (pertama) dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

Pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 untuk realisasi indikator kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 172,18% dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 200% dengan kriteria penilaian tercapai. Sedangkan untuk indikator Prevalensi Penyakit (Insidensi TB) sebesar 158,26% dengan kriteria tidak tercapai, hal ini dikarenakan kurang nya jumlah tenaga kesehatan yang melakukan skrenning Tuberkulosis (TB) untuk meningkatkan cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (TB).

Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun 2025-2029 untuk sasaran strategis Meningkatnya Kesehatan Ibu dengan indikator Angka Kematian Ibu (AKI) realisasi sebesar 88,76% dan Prevalensi Stunting realisasi sebesar 82,45% untuk kedua indikator tersebut termasuk kategori tercapai dengan catatan, sedangkan untuk Angka Kematian Balita realisasi sebesar 115,11% dengan kategori tercapai. Untuk sasaran strategis Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan indikator Angka Populasi Bebas Penyakit Menular realisasi sebesar 100% dengan kategori tidak tercapai dan Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular realisasi sebesar 333% dengan kategori tercapai. Untuk sasaran Meningkatnya Gaya Hidup Sehat dengan indikator Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik yang cukup realisasi sebesar 121,38% dengan kategori tercapai. Untuk sasaran Meningkatnya Layanan Kesehatan Baik dan Inklusif dengan indikator Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda Terakreditasi

Paripurna realisasi sebesar 100% dan Persentase Masyarakat memiliki Asuransi Kesehatan Aktif realisasi sebesar 98,82% untuk kedua indikator tersebut termasuk kategori tercapai. Untuk sasaran strategis Meningkatnya Integrasi Layanan Kesehatan dengan indikator Proporsi Fasyankes Terintegrasi SIKN realisasi sebesar 175,19% dengan kategori tercapai. Kondisi ini menunjukkan adanya komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk untuk mewujudkan target kinerja yang direncanakan dan ditetapkan.

B. TINDAK LANJUT

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi untuk perencanaan kegiatan pada tahun mendatang dan sebagai umpan balik bagi pihak yang berkepentingan. Selain itu, diupayakan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Keberhasilan program dan kegiatan bidang kesehatan tidak dapat dilaksanakan sendiri tetapi juga membutuhkan kerjasama lintas program dan lintas sektor.

LAMPIRAN

Dapat di akses melalui tautan berikut ini :

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18UlHI7j1e5aRJfmsmOogdQ1zZXyYLUgU